poskota.co.id
poskotanetwork
@poskotanetwork
poskota
Harian Poskota
poskota.official

POSKOTA
Media Independen

56 Tahun 1970-2026

RABU, 4 NOVEMBER 2026, 12 HALAMAN | JABODETABEK RP4.000 - LUAR JABODETABEK RP4.500 | TERVERIFIKASI DEWAN PERS NO: 979/DP-Verifikasi/K/IV/2022 | EDISI NO: 1.838.308

Karier Eks Kapolri Listyo Sigit Berakhir di Jeruji Besi

Bersama Dua Jenderal Terlibat Kasus Penyadapan Ilegal Presiden



PENYADAPAN: Polri saat menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dua perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/11). Dalam perkara tersebut, ketiga tersangka telah ditahan di Rutan Mabes Polri setelah penyidik mengantongi sejumlah alat bukti. (Poskota/Ali Mansur)

JAKARTA (Poskota) - Karier mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) berujung di balik jeruji besi. Bareskrim Polri menetapkan Listyo sebagai tersangka sekaligus menahannya dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo Subianto.

Tak hanya Listyo, dua perwira tinggi Polri lainnya, yakni Irjen Eko Hadi (EH) dan Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), juga ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri. Ketiganya diduga terlibat dalam praktik penyadapan tanpa prosedur hukum yang berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.

Kepala Bareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin, mengatakan penetapan ketiga tersangka merupakan hasil rangkaian penyelidikan dan penyidikan menggunakan metode scientific crime investigation. Penyidik telah memeriksa 10 saksi dan meminta keterangan tiga orang ahli sebelum menetapkan status hukum para tersangka.

"Berdasarkan hasil penyelidikan secara scientific crime investigation dan proses penanganan perkara, penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH," tegas Asep dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/11) malam.

Asep menegaskan, ketiga tersangka kini telah menjalani penahanan di Rutan Mabes Polri untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut. "Terhadap tersangka kita tahan di Rutan Mabes Polri. Terima kasih," ujarnya.

Dalam perkara ini, penyidik menduga para tersangka memerintahkan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon dengan memasukkannya ke dalam server Lawful Interception Management System (LINS) tanpa melalui mekanisme verifikasi sebagaimana mestinya.

Padahal, penyadapan merupakan tindakan khusus yang harus dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum. Salah satunya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri.

Namun, dari hasil penyidikan sementara, aktivitas penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi. Penyadapan juga disebut tidak berkaitan dengan kepentingan penyelidikan ataupun penyidikan tindak pidana.

Bersambung ke Halaman 11

Buah Bibir

Amanda Manopo

Masih Minder dengan Berat Badan

AKTRIS Amanda Manopo membantah kabar yang menyebut dirinya akan pensiun dari dunia hiburan Tanah Air setelah melahirkan anak pertamanya. Ia menegaskan hanya ingin mengambil jeda sementara untuk fokus mengurus buah hatinya.

Di tengah menikmati peran barunya sebagai seorang ibu, istri Kenny Austin tersebut mengaku masih menerima berbagai tawaran pekerjaan di industri hiburan.

Namun, Amanda memilih memprioritaskan waktu bersama putranya, Baby Zac, terutama untuk mendampingi masa-masa penting tumbuh kembang sang buah hati.

Selain ingin fokus mengasuh anak, perempuan berusia 26 tahun itu mengaku masih kurang percaya diri untuk kembali beraktivitas di depan kamera lantaran mengalami kenaikan berat badan yang cukup signifikan selama kehamilan.



Karena itu, Amanda memilih untuk tidak terburu-buru kembali berakting. Ia ingin memberikan waktu bagi dirinya untuk memulihkan kondisi tubuh dan mengembalikan berat badan ke kondisi yang diinginkan sebelum kembali aktif di layar kaca. **(tog)**

Driver Taksi Online Dibegal Tiga Penumpang

Diancam Golok dan Dibuang di Lapangan



(Istimewa)

TKP: Anggota Reskrim Polsek Tigaraksa melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP) pembegalan terhadap seorang pengemudi taksi online di Kampung Bugel, Kelurahan Kadu Agung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.

TANGERANG (Poskota) - Aksi kejahatan terhadap pengemudi taksi online kembali terjadi di Kabupaten Tangerang. Kali ini, seorang pengemudi berinisial SP, 67 tahun, menjadi korban pembegalan oleh tiga orang penumpang yang memesan jasanya dari Tanjung Priok, Jakarta Utara, menuju kawasan Taman Dago, Parung Panjang.

Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (31/10) sekitar pukul 16.00 WIB. Korban tidak hanya kehilangan kendaraan, tetapi juga telepon genggam dan dompet setelah diancam menggunakan senjata tajam jenis golok.

Kanit Reskrim Polsek Tigaraksa, Ipda Muhdiawan, menjelaskan kejadian bermula ketika korban menerima pesanan perjalanan dari tiga orang penumpang dengan tujuan Taman Dago, Parung Panjang.

Setibanya di lokasi tujuan, salah seorang penumpang tiba-tiba mengancam korban menggunakan golok. Dalam kondisi ketakutan, korban dipaksa tetap mengemudikan mobil mengikuti arahan para pelaku.

Situasi semakin mencekam ketika dua orang pelaku mengikat korban dan menutup kedua matanya saat kendaraan masih dalam perjalanan.

Bersambung ke Halaman 11

Ribuan Data Penerima KJMU Bermasalah

Pramono Target 6 November Tuntas

JAKARTA (Poskota) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan permohonan maaf kepada mahasiswa penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) atas keterlambatan pencairan bantuan pendidikan tersebut. Memasuki hari ketiga sejak jadwal pencairan, dana bantuan belum sepenuhnya diterima mahasiswa.

Pramono mengungkapkan, keterlambatan pencairan KJMU Tahap II Tahun 2026 disebabkan sejumlah persoalan administrasi dan ketidaksesuaian data penerima. Kendala tersebut antara lain menyangkut nomor rekening, Nomor Induk Kependudukan (NIK), hingga data wilayah administrasi.

"Pemerintah DKI Jakarta menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan ini. Kenapa terlambat? Karena banyak faktor," ujar Pramono kepada awak media di Hotel Pullman Jakarta Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (3/11).

Bersambung ke Halaman 11

PT KAI Siapkan Alat Berat Bersihkan Kampung Bahari

46 Warga Terima Bantuan

JAKARTA (Poskota) - PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyiapkan alat berat dan kendaraan pengangkut sampah untuk membersihkan kawasan permukiman di sekitar jalur kereta api Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pembersihan dijadwalkan mulai Rabu (4/11) sebagai bagian dari penataan kawasan yang melibatkan kepolisian, kementerian, dan pemerintah daerah.

Penataan kawasan tersebut merupakan tindak lanjut upaya pemberantasan peredaran narkoba sekaligus pembenahan lingkungan permukiman. Namun, pemerintah memastikan langkah tersebut tidak hanya berorientasi pada penertiban dan pembersihan, tetapi juga memperhatikan nasib warga, termasuk tempat tinggal dan mata pencaharian mereka.

Executive Vice President (EVP) Daop 1 Jakarta PT KAI Januri mengatakan, pengerahan alat berat dan kendaraan pengangkut sampah akan dilakukan secara bertahap. Pelaksanaannya tetap memperhatikan keselamatan perjalanan kereta api serta aktivitas masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi.

Bersambung ke Halaman 11

JADWAL SALAT

SUBUH	ZUHUR	ASAR	MARIB	ISYA
04.41	11.58	15.19	17.54	19.05

ASN TIDAK CANTUMKAN STATUS NIKAH, AKAL BULUS SUAMI UNTUK KAWIN LAGI

NAH... ini dia



RUPANYA memang akal bulus Aspana yang tidak mendaftarkan status pernikahannya di daftar kepegawaian PNS di Lebak, Banten. Waktu masuk CPNS , dia memang masih bujang, tapi kemudian menikah resmi dengan Dita. Tapi dia tidak perbarui data status nikah itu. Itu dipakai untuk bisa leluasa untuk nikah lagi. Jadi statusnya di ASN tertulis masih tetap lajang, padahal sudah nikah resmi dengan Dita, 3 tahun sebelumnya dan punya anak satu, umur 2,5 tahun. Toh akhirnya akal bulus Aspana itu terbongkar oleh istrinya.

Bersambung ke Halaman 4

Program PECAK Polsek Cikande

Menjemput Asa di Tengah Dahaga Warga

Penulis : *Rahmat Haryono*

TERIK matahari menyengat ubun-ubun warga Kampung Maja Asem, Desa Kibin, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Selasa (3/11) siang. Di tengah peluhnya musim kemarau yang telah berbulan-bulan mendera, sebuah pemandangan yang menyejukkan mendadak memecah kesunyian dusun. Truk tangki air datang membawa asa.

Suara deru mesin truk tangki itu seolah menjadi simfoni kehidupan bagi warga setempat. Satu per satu warga, mulai dari ibu rumah tangga hingga para lansia, berbondong-bondong keluar rumah.

Mereka berjalan tertib dengan membawa berbagai wadah penampungan. Mulai dari ember plastik, jerigen, hingga panci kusam demi berebut berkecap air bersih yang selama ini menjadi barang mewah di tengah kekeringan.

Bersambung ke Halaman 11



ANTRE: Warga Kampung Maja Asem, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, antusias mengantre membawa jerigen dan ember untuk mendapatkan air bersih bantuan dari Kapolres Serang AKBP Moehamad Probandono Bobby Danuardi, Selasa (3/11). Bantuan ini disalurkan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak musim kemarau. (Dok. Polsek Cikande)



Haloo... Bang Jaki

Rubrik ini menampung keluhan atau kritik warga pada pelayanan publik, fasilitas umum dan lain lain. Kirim kritik dan keluhan anda ke WhatsApp: 081188098706

Topping Pohon-Pohon Lebat di Jl. Letjen Suprapto Kemayoran

▶ Kepada Yth. Gubernur Jakarta, Walikota Jakarta Pusat dan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, tolong topping pohon-pohon lebat di sepanjang Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, antisipasi pohon tumbang menimpa pengendara. (0812255xxxx)

Tertibkan Bajaj Mangkal di bawah JPO Halte Busway Jelambar

▶ Petugas Dishub Jakarta Barat agar menertibkan Bajaj mangkal setiap pagi di bawah tangga JPO halte busway Jelambar, karena menggangu kenyamanan pejalan kaki. Terima kasih. (083815980xxx)

PKL di Jalan Gorontalo Timbulkan Kemacetan

▶ Menjamurnya PKL di sepanjang Jalan Gorongtalo, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, kerap membuat kemacetan. Mohon Pak Wali Kota Jakarta Utara, Satpol PP, Camat dan lurah menertibkan. (083806512xxx)

Banyak Sampah di Kali Bendungan Melayu

▶ Banyak sampah di kali Bendungan Melayu. Tugu Selatan. Koja Dan. Banyak PKL di Jalan Raya Bendungan Melayu. Warga minta. Gubernur DKI. Walikota Camat Lurah Satpol PP untuk menertibkan. Wilayahmasing-masing.kumuh. (0838065 1xxxx)

Stempel

Pakar hukum tata negara, Prof. Denny Indrayana mengatakan, lewat putusan MK yang dikonfirmasi dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung, maka Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden, terutama dalam konteks ini adalah syarat pendidikan. Pemalzulan harus jalan.

Tidak merasa, dan berlagak plonga-plongo, aman meski tidak mundur.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menduga Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mempersiapkan perjalanan dinas ke Jepang untuk mengantisipasi panggilan pemeriksaan KPK.

Langsung dicekal saja biar mudah dan tidak akal-akalan.

Juru Bicara Badan Gizi Nasional (BGN) Tysa Novenny mengatakan, dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berhasil menyerap 1,03 juta tenaga kerja dari masyarakat lokal.

Kalau SPPG yang membuat keracunan a berapa pak? Beeani jamin ya, tak ada keracunan lagi.



Poskota/Beritajakarta

GLODOK JADI PUSAT EKONOMI KREATIF BARU: Jakarta menyiapkan sejumlah kawasan menjadi untuk menjadi poros baru ekonomi kreatif seperti Blok M, kawasan tersebut antara lain Glodok Pecinan, Pasar Baru serta Kota Tua. Kedepannya Glodok Pecinan akan dijadikan kawasan ekonomi kreatif yang dipadukan dengan sejarah kebudayaan masyarakat Tionghoa. Selain itu Pemerintah Kota Jakarta Barat menggandeng 40 kreator konten dan 40 anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) dalam kegiatan familiarization trip (fam trip) di kawasan Pecinan Glodok, Tamansari.







SOSOK

Direktur RSUD Berkah Pandeglang, dr. Cut Budiarti

Kepercayaan Masyarakat Meningkat

POSKOTA – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah Kabupaten Pandeglang, dr. Cut Budiarti Emasanda, terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sejumlah fasilitas kesehatan, mulai dari instalasi gawat darurat (IGD) hingga poliklinik, terus diperkuat untuk memenuhi kebutuhan pasien.

Peningkatan pelayanan ini dilakukan seiring bertambahnya jumlah masyarakat yang datang untuk mendapatkan penanganan medis di RSUD Berkah. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.

"Seperti sekarang ini, masyarakat Pandeglang yang datang ke RSUD untuk mendapatkan layanan, baik di IGD maupun poliklinik, terus meningkat. Alhamdulillah, kepercayaan masyarakat Pandeglang terhadap layanan RSUD Berkah ini terus mengalami peningkatan," ujar Cut Budiarti, Selasa (3/11).

Menurutnya, peningkatan jumlah pasien juga terlihat pada layanan rawat inap. Jika sebelumnya rata-rata pasien rawat inap berkisar 60 hingga 80 orang per hari, kini jumlahnya dapat mencapai sekitar 190 pasien per hari.

Untuk mengantisipasi kebutuhan tersebut, kapasitas tempat tidur di IGD juga ditambah. Dari sebelumnya hanya 16 tempat tidur, kini RSUD Berkah telah menyediakan 50 tempat tidur.

Cut Budiarti menegaskan, penguatan fasilitas dan peningkatan kualitas sumber daya pelayanan akan terus dilakukan agar masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang semakin baik.

"Kami terus berupaya meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan di RSUD Berkah Pandeglang agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang semakin baik," katanya.

Selain memperkuat layanan IGD dan poliklinik, RSUD Berkah juga telah memiliki gedung catheterization laboratory (Cathlab) yang dibangun pemerintah pusat pada tahun lalu.

Fasilitas tersebut diproyeksikan mendukung penanganan penyakit jantung dan pembuluh darah, sekaligus memperkuat layanan untuk penyakit kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi (KJSU).

"Cathlab itu untuk layanan dalam program KJSU, yakni kanker, jantung, stroke, dan uronefro. Jadi, ke depan pasien yang mengalami serangan jantung dan stroke bisa mendapatkan pelayanan di RSUD Berkah Pandeglang," ungkap Cut saat ditemui di ruang kerjanya.

Dengan keberadaan fasilitas tersebut, masyarakat Pandeglang diharapkan dapat memperoleh penanganan medis tertentu tanpa harus selalu dirujuk ke rumah sakit di luar daerah.

"Nantinya pasien yang mengalami serangan jantung dan stroke tidak lagi harus ke luar daerah karena di RSUD ini sudah ada fasilitasnya, sehingga bisa ditangani di RSUD Berkah Pandeglang," tandasnya. **(fat)**



Poskota/Samsul Fatoni

Direktur RSUD Berkah Pandeglang, dr. Cut Budiarti Emasanda, berkomitmen meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui penguatan fasilitas dan layanan medis.

SENTAL SENTIL Obrolan Warteg:

Jangan Sampai Demokrasi Kehilangan Ruhnya

Demokrasi harus menghasilkan keadilan sosial dan kesejahteraan, bukan sekadar menjamin hak masyarakat untuk memilih dan dipilih.

Karenanya, demokrasi politik harus berjalan beriringan dengan demokrasi ekonomi sehingga kedaulatan rakyat benar – benar bermuara pada keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh rakyat.

Itu yang dikatakan Ketua DPR, Puan Maharani dalam pidato kebangsaan pada Habibie Democracy Forum 2026, di Jakarta, Selasa, 3 November 2026.

"Pertanyaannya kemudian kalau demokrasi tanpa menghasilkan keadilan dan kesejahteraan, apakah masih layak sebagai demokrasi," ujar bung Heri mengawali "Obrolan Warteg" bersama sohibnya, mas Bro dan bang Yudi.

"Demokrasinya tetap ada, tapi belum berjalan sebagaimana diharapkan . Sebab demokrasi sejati bertujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat," ujar Yudi.

"Yang jelas, demokrasi tanpa keadilan dan kesejahteraan akan kehilangan ruhnya, makna dan substansinya," kata Heri.

"Bisa nggak dikatakan demokrasi tanpa keadilan adalah nihilisme?," tanya Heri.

"Tafsir politik sah – sah saja karena demokrasi tak lepas dari persoalan politik, Tetapi soal nihilisme jadi teringat dengan ungkapan yang pernah disampaikan Bung Karno: Nasionalisme tanpa keadilan sosial adalah nihilisme artinya kehilangan esensinya," urai mas Bro.

"Kita berharap jangan sampai demokrasi kehilangan makna, hanya memastikan hak suara rakyat melalui pesta demokrasi. Tetapi pesta demokrasi usai, suara rakyat terabaikan," kata Heri.

"Jangan sampai rakyat dijadikan alat untuk menentukan pemimpin masa depan melalui penggunaan suaranya di pemilu, tetapi masa depan rakyat tetap suram karena pemimpin yang telah terpilih lupa kepada rakyat yang dulu memilihnya," ungkap mas Bro.

"Padahal makna demokrasi adalah dari rakyat untuk rakyat.Lebih luas lagi, pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat," kata Yudi.

"Hendaknya kekuasaan yang diberikan oleh rakyat dikembalikan kepada rakyat. Artinya kekuasaan dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk memenuhi ambisi pejabat dan kerabat," kata Heri.

"Apalagi kalau sampai kekuasaan dikorupsi .Melalui kekuasaan yang dimiliki dijadikan alat untuk korupsi, menelorkan kebijakan demi kepentingan pribadi dan keluarganya," kata mas Bro.

"Apa ada pemimpin yang demikian?," tanya Heri.

"Bukan hanya ada, tetapi marak. Sudah ribuan pejabat terjerat korupsi, ratusan di antaranya pejabat publik yang dipilih oleh rakyat," jelas Yudi.

"Semoga ke depan, demokrasi bukan hanya memastikan kekuasaan berasal dari rakyat, tetapi juga menjamin rakyat memiliki kedsulatan untuk menentukan arah kehidupan dan menikmati hasil pembangunan. Itu tantangan terbesar demokrasi. mari kita kawal bersama," urai mas Bro. **(Joko Lestari)**



Jakarta Hasilkan 9.000 Ton Sampah Sehari

Pramono Siapkan Tiga PLTSa



Poskota/Magang 2

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dan Sekretaris Jenderal CityNet Vijay Jagannathan dalam The 46th CityNet Executive Committee Meeting di Hotel Pullman Jakarta Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2026).

JAKARTA (Poskota) – Persoalan sampah, transportasi, dan polusi udara masih menjadi tantangan besar yang harus ditangani Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Ketiga masalah tersebut dinilai berpengaruh terhadap kualitas lingkungan dan kehidupan warga Ibu Kota.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan hal itu saat menghadiri The 46th CityNet Executive Committee Meeting di Hotel Pullman Jakarta Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (3/11).

Pramono mengatakan, ketiga persoalan tersebut menjadi pembahasan penting dalam forum yang mempertemukan para pemimpin kota dan mitra dari kawasan Asia Pasifik.

"Jadi kalau untuk Jakarta, tentunya hal-hal yang menjadi persoalan yang selama ini dialami Jakarta berkaitan dengan transportasi, persoalan sampah, kemudian juga polusi, pasti itu yang menjadi bahan bahasan utama," ujar Pramono.

Dia mengungkapkan, Jakarta setiap hari menghasilkan sekitar 9.000 ton sampah. Jumlah tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan sampah perkotaan.

Sebagai salah satu upaya penanganan, Pemprov DKI Jakarta berencana membangun dua hingga tiga Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Fasilitas tersebut diproyeksikan mampu mengolah sekitar 7.000 ton sampah per hari.

Selain pengelolaan sampah, pemerintah daerah juga terus menghadapi pekerjaan besar dalam membenahi transportasi dan mengendalikan polusi udara.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, Jakarta memiliki peran penting sebagai model pembangunan perkotaan di Indonesia.

Menurutnya, perkembangan Ibu Kota sejak awal berdirinya Republik Indonesia turut menjadi acuan dalam pembangunan kota-kota besar, khususnya kawasan metropolitan.

"Jakarta ini sejak awal berdirinya Republik ini menjadi model pembangunan. Dan model pembangunan itu sampai hari ini kita jadikan dasar bagaimana membangun kota besar khususnya metropolitan dan sekarang menjadi kawasan metropolitan yang berkembang di Jabodetabek," ungkap Rachmat.

Ia menjelaskan, perkembangan Jakarta tidak terlepas dari wilayah penyangga seperti Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Karena itu, pembangunan kawasan metropolitan membutuhkan koordinasi lintas daerah.

Rachmat menilai, pembenahan transportasi umum, penyediaan air bersih, serta pembangunan infrastruktur menjadi bagian penting dalam mendukung perkembangan kawasan Jabodetabek.

Melalui pertemuan CityNet, para pemimpin kota dan mitra dari kawasan Asia Pasifik diharapkan dapat berbagi pengalaman dan bertukar informasi mengenai persoalan serta strategi pembangunan perkotaan. **(M3)**

11 Kapolsek di Wilayah Polda Metro Jaya Berganti

JAKARTA (Poskota) - Sebanyak 198 perwira pertama (Pama) dan perwira menengah (Pamen) di lingkungan Polda Metro Jaya mengalami rotasi dan mutasi jabatan. Penyegaran organisasi tersebut mencakup pergantian 11 kapolsek serta sejumlah kepala satuan (kasat) di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto Nomor ST/1071/XI/KEP./2026 tertanggal 3 November 2026. Surat itu ditandatangani Karo SDM Polda Metro Jaya Kombes Pol Agus Nugroho.

Pergantian jabatan kapolsek paling banyak terjadi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan. Salah satunya Kapolsek Metro Setiabudi yang kini dijabat AKBP Jerico Lavian Chandra, menggantikan AKBP Riyanto.

Sementara itu, AKBP Nugrahadi Kusuma yang sebelumnya menjabat Kapolsek Kebayoran Baru mendapat pemugasan baru sebagai Kasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Posisi yang ditinggalkannya kini diisi AKBP M Rhobby Syahferry.

Rotasi juga menyasar wilayah Pesanggrahan, Tebet, dan Jagakarsa. AKP Muhammad Hadimas ditunjuk sebagai Ps Kapolsek Pesanggrahan menggantikan AKP Dikie Wahyudi. Adapun Dikie mendapat tugas baru sebagai Ps Kapolsek Kelapa Dua.

Selanjutnya, AKP Arif Maulana menggantikan AKP Ischak sebagai Kapolsek Tebet. Sedangkan jabatan Kapolsek Jagakarsa kini diemban AKP Handam Samudro menggantikan Kompol Nurma Dewi.

Di wilayah Jakarta lainnya, AKP Muhammad Agil Sachril dipercaya menjabat Kapolsek Kalibaru dan AKP Arga Ariandra Siregar menjadi Kapolsek Kelapa Gading.

Pergantian juga berlangsung di wilayah penyangga Ibu Kota. Kompol Richard Soala Bengar menjabat Kapolsek Bekasi Utara, Kompol Samsono dipercaya sebagai Kapolsek Cilincing, sedangkan Kompol Sutrisno mendapat tugas sebagai Kapolsek Jatinegara.

Selain kapolsek, rotasi jabatan turut menyasar sejumlah kasat di lingkungan polres. Kompol Oscar Stefanus Setjo diangkat menjadi Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. AKBP Mochamad Meltha Mubarak mendapat tugas sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota.

Adapun AKP Aditya Rizky Nugroho menjadi Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Kompol Sampson Sosa Hutapea menjabat Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, serta Kompol Girindra Wardana Akbar dipercaya sebagai Ps Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi.

Pada satuan reserse narkoba, AKBP Sonny Wibisono ditugaskan sebagai Kasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat. AKBP Mohamad Iskandarsyah menjabat Kasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Utara, sementara AKP Wan Deni Ramona Gusti menjadi Kasat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta.

Rotasi juga menyentuh jajaran lalu lintas. Kompol Rustam Febrianzah diangkat sebagai Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Sugihartono menjadi Kasat Lantas Polres Metro Tangerang Kota, dan Kompol M Rizky Guntama Ganda Permana menjabat Kasat Lantas Polresta Bandara Soekarno-Hatta.

Di tingkat direktorat Polda Metro Jaya, AKBP Parikhesit kini menjabat Kabagrenim Ditreskrimum. Ia menggantikan AKBP Netty Rosdiana Siagian yang mengundurkan diri dari institusi kepolisian dan kini berstatus Pamen Ditreskrimum dalam rangka pensiun dini.

Selain itu, AKBP Onkoseno Grandiarso Sukahar dipercaya menjadi Kasubdit 2 Ekbank Ditreskrimsus. Kompol Mulya Adhimara menggantikan AKBP Ardila Amry sebagai Kasubdit 1 Indag Ditreskrimsus.

Pergantian juga terjadi pada jajaran kepala unit. AKP Nurul Farouq Fadillah kini mengisi posisi Kanit 5 Subdit Resmob yang sebelumnya dijabat Kompol Arief Ryzki Wicaksana.

Rotasi dan mutasi tersebut menjadi bagian dari penyegaran organisasi di lingkungan Polda Metro Jaya dengan penempatan sejumlah perwira pada jabatan baru. **(den)**

DKI Bangun Sistem Pengasuhan Berkelanjutan bagi Anak

JAKARTA (Poskota) - Perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan, penelantaran, eksploitasi, maupun konflik keluarga tidak cukup hanya dengan menyelamatkan mereka dari situasi berbahaya. Kepastian pengasuhan yang aman dan berkelanjutan juga harus menjadi perhatian agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Untuk memastikan hal tersebut, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta melalui Unit Pelaksana Teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPPA) memperkuat mekanisme rujukan serta koordinasi lintas sektor dalam penanganan anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Upaya itu dilakukan melalui kegiatan bertajuk Penguatan Mekanisme Rujukan Perencanaan Pengasuhan dalam Penanganan Kasus Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus di Aula Lantai 3 UPT PPPA DKI Jakarta, Senin (2/11).

Kegiatan tersebut melibatkan perwakilan Biro Kesejahteraan Sosial, Dinas PPAPP, Dinas Sosial, Suku Dinas Sosial, lembaga kesejahteraan sosial, serta jajaran UPT PPPA DKI Jakarta.

Kepala UPT PPPA DKI Jakarta, Rahayu Sri Rahmawati, mengatakan penanganan anak yang membutuhkan perlindungan khusus harus memperhatikan masa depan dan kepastian pengasuhannya. Menurutnya, perlindungan sementara tidak cukup apabila anak belum mendapatkan lingkungan yang aman untuk melanjutkan kehidupan.

"Ketika seorang anak harus keluar dari lingkungan keluarga karena mengalami kekerasan, penelantaran, atau kondisi lain yang membahayakan, tugas kita tidak berhenti pada pemberian perlindungan sementara. Kita juga harus memikirkan masa depan anak, termasuk siapa yang akan mengasuhnya, bagaimana kebutuhan tumbuh kembangnya terpenuhi, dan bagaimana memastikan ia memiliki lingkungan yang aman," ujar Rahayu.

Ia menjelaskan, perencanaan pengasuhan harus didasarkan pada asesmen menyeluruh dengan mempertimbangkan kondisi, kebutuhan, keamanan, serta kepentingan terbaik anak.

Pengasuhan dalam lingkungan keluarga tetap menjadi pilihan utama sepanjang keluarga dinilai mampu memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan anak. Namun, apabila keluarga justru menjadi sumber ancaman, alternatif pengasuhan perlu dipertimbangkan sesuai hasil asesmen dan ketentuan yang berlaku.

Rahayu menegaskan, penempatan anak di lembaga kesejahteraan sosial atau panti tidak boleh sekadar menjadi solusi tempat tinggal sementara. Proses tersebut harus disertai perencanaan, pemantauan, dan evaluasi berkala, termasuk kemungkinan anak kembali ke keluarganya setelah situasi dinilai aman.

"Jangan sampai anak hanya berpindah tempat tanpa mendapatkan kepastian pengasuhan. Kita perlu memastikan bahwa setiap proses penanganan benar-benar menjawab kebutuhan anak dan menjamin keberlanjutan pengasuhannya," katanya.

Karena itu, penguatan mekanisme rujukan diperlukan untuk memperjelas kriteria rujukan, pembagian tugas antarinstansi, serta alur koordinasi mulai dari asesmen, penerimaan rujukan, pemberian layanan hingga pemantauan.

Dalam kegiatan tersebut, Nahar dari Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung menyampaikan bahwa setiap anak memiliki pengalaman dan kebutuhan berbeda. Dengan demikian, bentuk perlindungan maupun pengasuhan tidak dapat ditentukan secara seragam.

Menurutnya, asesmen menjadi dasar untuk menentukan langkah penanganan yang tepat, termasuk ketika anak membutuhkan pengasuhan di luar keluarga. Pengelolaan kasus juga harus terhubung dengan layanan berbagai instansi agar penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Sementara itu, Rendiansyah Putra Dinata dari Save the Children Indonesia menekankan pentingnya permanency planning atau perencanaan pengasuhan yang menetap dan berkelanjutan. **(den)**



Poskota/fattmasus

LINGKUNGAN - Presidium P2M Aan Harinurdin meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membatasi penggunaan kemasan AMDK plastik sekali pakai untuk menekan timbulan sampah di Ibu Kota.

P2M Desak Pramono Batasi AMDK Plastik di Bawah 1 Liter

JAKARTA (Poskota) - Persoalan sampah plastik di Ibu Kota membutuhkan penanganan serius dari hulu hingga hilir. Partisipasi Pengembangan Masyarakat (P2M) pun meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung segera menerapkan kebijakan pengurangan sampah plastik, khususnya dari kemasan air minum dalam kemasan (AMDK) sekali pakai berukuran di bawah satu liter.

P2M mendorong Pemprov DKI mengimplementasikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen periode 2020-2029. Regulasi tersebut menargetkan pengurangan sampah oleh produsen sebesar 30 persen pada 2029.

Salah satu sasaran pengurangan dalam aturan tersebut adalah kemasan botol plastik sekali pakai, termasuk yang berukuran di bawah satu liter.

Presidium P2M, Aan Harinurdin, menilai kebijakan tersebut perlu ditindaklanjuti secara tegas. Pasalnya, produksi sampah di Jakarta mencapai 7.000 hingga 8.000 ton setiap hari, sehingga diperlukan keterlibatan seluruh pihak untuk menekan timbulan sampah.

"AMDK plastik menjadi salah satu sumber persoalan sampah di Jakarta. Untuk itu, Pak Gubernur juga perlu tegas terhadap produsen AMDK plastik agar ikut berkontribusi mengurangi sampah plastik," kata Aan dalam diskusi P2M di Sekretariat Lintas Generasi Aktivis (LIGA) Pro Jakarta, Gedung Gondangdia Lama 25, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (3/11).

Menurut Aan, produsen AMDK tidak boleh hanya mengejar keuntungan bisnis tanpa memperhitungkan dampak lingkungan dari kemasan yang dihasilkan. Terlebih, sampah plastik membutuhkan waktu lama untuk terurai dan berpotensi menambah beban pencemaran.

Ia juga mendorong PAM Jaya sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) Pemprov DKI Jakarta segera merealisasikan rencana bisnis AMDK dengan menggunakan wadah yang lebih ramah lingkungan.

"Jangan sampai persoalan sampah hanya dibebankan kepada pemerintah dan masyarakat, sementara produsen tidak ikut bertanggung jawab," ujarnya.

Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular KLH/BPLH RI, Agus Rusli, menjelaskan bahwa penerapan Extended Producer Responsibility (EPR) atau tanggung jawab produsen menjadi salah satu instrumen penting dalam mengurangi pencemaran akibat sampah kemasan.

Melalui konsep tersebut, produsen makanan, minuman, kosmetik, dan produk lainnya didorong bertanggung jawab mengelola kemasan setelah digunakan konsumen.

"Jadi, setiap perusahaan harus bertanggung jawab terhadap sampah-sampah yang mereka hasilkan," kata Agus.

Ia menegaskan, tanggung jawab itu harus diwujudkan dengan memastikan kemasan produk yang beredar dapat dikumpulkan kembali dan dikelola secara tepat agar tidak berakhir mencemari lingkungan.

Agus menyebut, produksi sampah nasional mencapai sekitar 140 ribu ton per hari. Hampir 20 persen di antaranya merupakan sampah plastik atau setara 28 ribu ton setiap hari.

Jenisnya beragam, mulai dari botol plastik hingga kemasan multilapis dan saset yang memiliki nilai ekonomi rendah serta sulit didaur ulang.

Menurut dia, produsen yang menggunakan kemasan multilapis berpotensi menanggung biaya tanggung jawab lebih besar dibandingkan perusahaan yang memakai kemasan satu lapis. Kebijakan tersebut diharapkan mendorong industri beralih ke kemasan yang lebih mudah dikelola.

Selain tanggung jawab produsen, Agus juga menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Padahal, berbagai daerah telah memiliki aturan yang melarang tindakan tersebut.

"Penegakan hukum perlu dilakukan agar muncul efek jera. Penindakan juga bisa menjadi perhatian publik sehingga mendorong masyarakat lainnya tidak membuang sampah sembarangan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, M Adib Awaludin, mengatakan berdasarkan studi komposisi dan karakteristik sampah pada 2022, sampah plastik menyumbang 22,9 persen dari total timbulan sampah Jakarta.

Dengan volume sampah sekitar 7.800 ton per hari, jumlah tersebut menunjukkan plastik masih menjadi persoalan yang harus ditangani secara serius.

Adib menyebut, DLH DKI terus mendorong pengurangan plastik sekali pakai melalui edukasi dan pembatasan penggunaan kantong belanja plastik. Masyarakat juga diajak membangun kebiasaan hidup minim sampah.

Untuk sampah yang tidak dapat dikurangi, penanganan dilakukan melalui optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) dan pengolahan menjadi bahan bakar alternatif atau Refuse Derived Fuel (RDF).

Edukasi juga diperluas melalui program Sekolah Adiwiyata mulai tingkat SD hingga SMA. Adib menyambut positif Instruksi Gubernur terkait pemilahan dan pengelolaan sampah dari sumber, termasuk pelibatan siswa dalam kegiatan pengurangan dan pengolahan sampah plastik di lingkungan sekolah. **(den)**

UNDANGAN RAPAT PEMBUBARAN YAYASAN

Tanggal : 3 Nopember 2026
Nomor : 001/UND/B2B/XI/2026

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pengurus, Pembina, dan Pengawas Yayasan
di Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan rencana pembubaran Yayasan Bahagia Banyak Berkat Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	: Selasa / 17 Nopember 2026
Waktu	: 10.00 WIB
Tempat	: Kantor Jl. Laksana B4 No 204 Jakarta Pusat

Agenda Rapat:
1. Pembahasan rencana pembubaran Yayasan.
2. Penyampaian laporan dan pertanggungjawaban pengurus.
3. Pembahasan kondisi keuangan serta asset dan kewajiban Yayasan.
4. Pembahasan penunjukan likuidator (apabila diperlukan).
5. Pengambilan Keputusan terkait pembubaran Yayasan.
6. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

Mengingat pentingnya agenda rapat tersebut, kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu tepat waktuagar rapat dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan Keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Yayasan Bahagia Banyak Berkat
Ttd
Tjendra Dewi Karto
Ketua Yayasan

PENGUMUMAN
RENCANA PENGALIHAN SAHAM
PT SARANA GAMA SEJAHTERA

Direksi PT Sarana Gama Sejahtera (PT SGS), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengumumkan kepada masyarakat dan seluruh pihak yang berkepentingan bahwa terdapat rencana pengalihan saham milik Dana Pensiun PELNI (Dalam Likuidasi) pada PT Sarana Gama Sejahtera kepada pihak ketiga.

Adapun rencana pengalihan saham tersebut merupakan bagian dari proses penyelesaian likuidasi Dana Pensiun PELNI (Dalam Likuidasi), dengan rincian sebagai berikut:

1. **Perseroan :** PT Sarana Gama Sejahtera, berkedudukan di Jakarta Pusat.
2. **Pemegang saham yang mengalihkan saham:** Dana Pensiun PELNI (Dalam Likuidasi).
3. **Objek pengalihan:** Saham milik Dana Pensiun PELNI (Dalam Likuidasi) pada PT Sarana Gama Sejahtera.
4. **Pihak penerima pengalihan:** Pihak ketiga sesuai dengan proses dan mekanisme pengalihan saham yang akan dilaksanakan.
5. **Pelaksanaan pengalihan:** Akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar PT Sarana Gama Sejahtera.

Pengumuman ini disampaikan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan, sekaligus untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta ketentuan terkait lainnya.

Bagi pihak yang berkepentingan, ringkasan rancangan pengalihan saham dapat diperoleh di kantor PT Sarana Gama Sejahtera, Jalan Angkasa Nomor 18, Jakarta Pusat 10130, sejak tanggal pengumuman ini sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB).

Demikian pengumuman ini disampaikan agar diketahui oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 04 November 2026
DIREKSI
PT SARANA GAMA SEJAHTERA

Bangunan Liar hambat Normalisasi Kali CBL Bakal Ditertibkan

BEKASI (Poskota) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi akan menertibkan bangunan liar yang menghambat proyek normalisasi Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL). Langkah tegas tersebut disiapkan untuk mempercepat penanganan banjir, terutama menjelang puncak musim hujan.

Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu meninjau lokasi yang menjadi kendala pengerjaan normalisasi. Setelah itu, Pemkab Bekasi akan menggelar rapat pimpinan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menentukan skema penertiban.

"Pasti ada langkah penanganannya. Saya akan lihat dulu lokasinya, setelah itu kita rapatkan untuk menentukan langkah penertiban. Kalau sudah diputuskan, pelaksanaannya bisa segera dilakukan, bahkan dalam waktu sekitar satu minggu setelah rapat," kata Asep seusai meninjau pembangunan jalan di Kecamatan Babelan, Selasa (3/11).

Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, mengungkapkan progres fisik normalisasi Kali CBL telah melampaui 60 persen.

Meski demikian, pelaksanaan pekerjaan di sejumlah wilayah masih menghadapi kendala. Bangunan liar yang berdiri di bantaran sungai menjadi salah satu penghambat pengerukan dan penataan alur sungai.

Lokasi yang masih menjadi perhatian antara lain kawasan Kalijaya, Kertamukti, Muktiwari hingga Sukatani.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinas SDABMBK telah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi. Koordinasi dilakukan agar penertiban bangunan yang menghalangi pekerjaan normalisasi dapat segera dilaksanakan.

"Kendala utama memang masih adanya bangunan liar. Kami sudah berkoordinasi dengan Satpol PP agar penanganannya bisa segera dilaksanakan, sehingga pekerjaan normalisasi dapat berjalan lebih efektif dan hasilnya lebih tertata," jelas Henri.

Selain persoalan bangunan liar, Henri menyebut masih terdapat sekitar satu kilometer alur sungai yang belum masuk dalam penganggaran utama. Karena itu, pihaknya tengah menyiapkan kajian teknis untuk mengusulkan tambahan anggaran melalui mekanisme Belanja Tidak Terduga (BTT).

Usulan tersebut akan dikoordinasikan bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bekasi.

Di sisi lain, pengerjaan normalisasi dari segmen Sukamahi hingga Muara telah memasuki tahap Provisional Hand Over (PHO) atau serah terima sementara.

Adapun penanganan normalisasi ke arah hulu hingga kawasan Cibitung ditargetkan dapat menyelesaikan seluruh kendala pada akhir November 2026.

Pemkab Bekasi berharap percepatan normalisasi Kali CBL, termasuk penertiban bangunan liar di bantaran sungai, dapat meningkatkan kapasitas aliran air dan mengurangi risiko banjir yang kerap mengancam permukiman warga saat musim hujan. **(den)**

Perusahan Pemilik Truk Maut di Bekasi Bakal Diperiksa Polisi

BEKASI (Poskota) – Polisi akan memanggil pihak perusahaan pemilik truk molen yang terlibat kecelakaan maut di Jalan Cut Mutia, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami kemungkinan adanya unsur kelalaian dalam operasional kendaraan yang menyebabkan enam orang meninggal dunia tersebut.

Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Joko Sembodo, mengatakan pemanggilan perusahaan menjadi bagian dari proses penyelidikan kecelakaan yang diduga dipicu kegagalan fungsi rem truk.

"Pastinya akan kita panggil untuk dimintai keterangan," kata Joko kepada wartawan, Selasa (3/11).

Meski demikian, Joko menyebut jadwal pemeriksaan pihak perusahaan masih dalam pengaturan. Polisi akan melanjutkan pendalaman untuk mengungkap seluruh aspek yang berkaitan dengan kecelakaan tersebut.

"Belum, masih continue," tuturnya.

Sebelumnya, polisi telah melakukan gelar perkara dan menetapkan pengemudi truk molen berinisial TM sebagai tersangka. Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik mengumpulkan sejumlah bukti terkait kecelakaan di Jalan Cut Mutia, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu.

Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Putu Kholis Aryana, mengatakan status hukum perkara telah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan pada Minggu (1/11/2026) malam. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) juga telah dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.

Berdasarkan hasil pendalaman sementara, truk molen diduga mengalami malfungsi pada sistem pengereman sehingga pengemudi kehilangan kendali. Kendaraan kemudian oleng ke kiri, menabrak tembok pembatas kampus, lalu menghantam warga yang berada di depan bangunan di sisi kiri jalan.

"Menetapkan TM, pengemudi truk molen yang terlibat kecelakaan di Jalan Cut Mutia, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, sebagai tersangka," kata Putu dalam keterangannya, Senin (2/11/2026).

Atas perbuatannya, TM dijerat Pasal 310 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ia terancam hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal Rp12 juta.

Saat ini, tersangka masih menjalani pemeriksaan untuk kepentingan penyidikan.

Putu menegaskan, kepolisian berupaya mempercepat penanganan perkara tanpa mengabaikan ketelitian dalam mengungkap penyebab kecelakaan. Menurutnya, keluarga korban berhak mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.

Ia juga mengingatkan para pemilik perusahaan angkutan barang agar rutin memeriksa kondisi kendaraan sebelum dioperasikan, terutama komponen penting seperti sistem pengereman.

"Kepada para pemilik dan pengemudi angkutan barang, kami mengimbau agar kondisi armada selalu dipantau sebelum beroperasi," tandasnya. **(den)**



Peternak ikan di Keramba Jaring Apung (KJA), Saguling Kabupaten Bandung Barat, menyortir ikan yang mati.

Gatot Pen@ Utama

Lima Ton Ikan Mati di Waduk Saguling Bandung Barat

Peternak KJA Rugi Ratusan Juta

BANDUNG BARAT (Poskota) – Peternak ikan di Keramba Jaring Apung (KJA) Waduk Saguling, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, kembali menghadapi kerugian besar. Fenomena kematian massal ikan kembali terjadi pada Oktober 2026 dan menyebabkan sekitar lima ton ikan mati dalam kurun waktu dua hari.

Salah seorang peternak KJA, Teten Buldani Hayat (52), mengaku mengalami kerugian sekitar Rp115 juta akibat peristiwa tersebut. Ikan yang mati terdiri dari jenis mas dan nila.

Menurut Teten, kematian ikan terjadi dalam dua gelombang, yakni pada 21-22 Oktober dan kembali terulang pada 28 Oktober 2026. "Kalau dihitung dari ikan yang mati saja, jumlahnya sekitar lima ton. Sebagian besar ikan mas dan nila," kata Teten.

Ia menduga kematian massal tersebut dipicu fenomena upwelling atau naiknya massa air dari dasar waduk ke permukaan. Pergerakan air ini berpotensi membawa material yang mengendap di dasar waduk sehingga memengaruhi suhu dan kualitas air.

Perubahan cuaca dari kemarau panjang menuju musim hujan diduga turut memicu fenomena tersebut. Kondisi perairan yang berubah secara mendadak membuat ikan di dalam keramba kesulitan beradaptasi.

"Perubahan cuaca dari kemarau panjang menuju hujan deras kemungkinan ikut memicu pergerakan air di dalam waduk. Saat kondisi air berubah, ikan menjadi sangat rentan," ujarnya.

Selain itu, penurunan kadar oksigen terlarut di dalam air turut memperburuk keadaan. Teten menyebut kadar oksigen yang biasanya berada di kisaran 2,6 sempat merosot hingga 0,7 saat kematian massal berlangsung.

"Ketika oksigen turun sejauh itu, ikan tidak punya cukup pasokan untuk bertahan. Akhirnya ikan di keramba satu per satu mati," jelasnya.

Dampak kejadian tersebut tidak hanya dirasakan dari ikan yang mati. Peternak juga terpaksa menjual ikan yang masih hidup dengan harga sangat murah untuk menghindari kerugian lebih besar.

Banyaknya peternak yang melakukan panen secara bersamaan membuat pasokan ikan di pasar melimpah. Akibatnya, harga jual yang biasanya mencapai Rp23 ribu per kilogram anjlok menjadi Rp5 ribu hingga Rp7 ribu per kilogram.

"Situasinya membuat kami tidak bisa menunggu harga normal. Ikan yang masih bisa diselamatkan langsung dijual, tetapi harganya hanya sekitar Rp5 ribu sampai Rp7 ribu per kilogram," ungkapnya.

Teten mengatakan, ikan yang dalam kondisi normal bisa menghasilkan pendapatan sekitar Rp120 juta, akhirnya hanya terjual dengan nilai sekitar Rp18 juta. Sementara ikan berukuran kecil yang tidak terserap pasar terpaksa dibagikan kepada masyarakat.

Menghadapi kondisi tersebut, Teten mulai mengurangi jumlah benih yang ditebar di keramba. Is juga menyiapkan mesin pompa air atau alkon untuk membantu menjaga pasokan oksigen bagi ikan.

"Kami sekarang lebih hati-hati. Jumlah benih dikurangi dan pompa disiapkan untuk membantu menjaga kondisi air, terutama ketika oksigen kembali turun," tuturnya.

Teten berharap peristiwa kematian massal ikan tidak kembali terjadi sepanjang 2026. Sebab, kejadian serupa pada 2025 sebelumnya telah menyebabkan kerugian besar bagi peternak KJA di Waduk Saguling.

Bahkan, total kerugian peternak akibat kematian massal ikan pada tahun lalu disebut mencapai sekitar Rp10 miliar. "Jangan sampai kejadian seperti tahun lalu kembali terulang. Saat ini saja kami sudah terpukul, dan kami berharap tidak ada lagi kematian ikan dalam jumlah besar," harapnya.

Di sisi lain, Teten juga meminta pemerintah memperhatikan persoalan pencemaran air yang berasal dari wilayah hulu. Menurutnya, limbah yang masuk ke Waduk Saguling berpotensi menurunkan kualitas air dan memperbesar risiko kematian ikan.

"Persoalan dari hulu juga harus diperhatikan. Kalau limbah terus masuk ke waduk, kualitas air pasti semakin tertekan. Ini yang harus dikendalikan supaya peternak tidak terus menjadi korban," pungkasnya. **(gat)**

Bupati Bekasi Targetkan 100 Kilometer Jalan Rusak Diperbaiki

BEKASI (Poskota) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menargetkan perbaikan dan peningkatan jalan rusak sepanjang 100 kilometer pada 2027. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pemerataan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Bekasi.

Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, optimistis target tersebut dapat direalisasikan sehingga pada 2028 tidak ada lagi ruas jalan kabupaten yang mengalami kerusakan berat.

Hal itu disampaikan Asep saat meninjau pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Babelan, Selasa (3/11). Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, serta jajaran Muspika Babelan.

Asep menjelaskan, dari total panjang jalan kabupaten yang mencapai 1.077 kilometer, masih terdapat sekitar 196 kilometer yang membutuhkan penanganan.

Pada tahun anggaran 2026, Pemkab Bekasi melalui Dinas SDABMBK sedang mengerjakan pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 32,5 kilometer. Sementara pada tahun berikutnya, penanganan akan ditingkatkan hingga sekitar 100 kilometer.

"Dari total panjang jalan 1.077 kilometer, masih ada sekitar 196 kilometer yang menjadi pekerjaan rumah kita. Tahun ini kita kerjakan 32,5 kilometer, sehingga pada 2027 kita menargetkan penanganan sekitar 100 kilometer. Mudah-mudahan target ini bisa tercapai, sehingga pada 2028 seluruh jalan di Kabupaten Bekasi sudah tertata dengan baik," ujar Asep.

Dalam peninjauan di Babelan, Asep juga melihat langsung proses pengecoran jalan beton di Desa Muara Bakti. Ruas jalan tersebut memiliki panjang hampir tiga kilometer dengan ketebalan beton mencapai 25 sentimeter.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak hanya difokuskan pada jalan, tetapi juga harus menyentuh fasilitas pelayanan publik lainnya. Karena itu, ia menginstruksikan jajarannya melakukan pemetaan terhadap bangunan sekolah dan puskesmas yang membutuhkan perbaikan maupun renovasi.

Sementara itu, Kepala Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, mengatakan peninjauan di Kecamatan Babelan mencakup tiga titik pekerjaan utama. Ketiganya meliputi penataan ruas Buni Bakti, ruas Ujung Jaya, serta pembangunan saluran drainase di wilayah Pangkalan dan Pulo Timaha.

Henri menjelaskan, progres fisik pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 32,5 kilometer pada 2026 telah mencapai 32 persen. Sedangkan realisasi keuangan baru tercatat sekitar sembilan persen.

Menurutnya, rendahnya penyerapan keuangan bukan berarti pekerjaan fisik berjalan lambat. Hal tersebut dipengaruhi mekanisme pembayaran proyek yang tidak menggunakan uang muka serta ketentuan pengujian mutu beton selama 28 hari sebelum pencairan termin.

"Memang penyerapan keuangan kita masih tertinggal karena tahun ini tidak ada uang muka maupun pembayaran termin. Namun, sejumlah pekerjaan fisik sudah selesai dan sebagian lainnya tinggal menunggu hasil uji lab. Kami tetap optimistis realisasi penyerapan anggaran bisa mencapai di atas 90 persen pada akhir tahun," jelas Henri.

Selain pembangunan jalan, Dinas SDABMBK juga terus melakukan normalisasi sungai untuk mengantisipasi banjir musiman. Progres pengerjaan normalisasi tersebut dilaporkan telah melampaui 60 persen.

Penanganan difokuskan pada pengerukan sedimentasi dan pelebaran alur di dua sungai utama, yakni Sungai Cikarang Bekasi Laut (CBL) dan Sungai Cikarang.

Dalam pelaksanaannya, Pemkab Bekasi juga menghadapi kendala keberadaan bangunan liar di sepanjang sempadan sungai. Untuk mengatasinya, Dinas SDABMBK telah berkoordinasi dengan Satpol PP Kabupaten Bekasi guna melakukan penertiban agar proses normalisasi dapat berjalan optimal.

Pemkab Bekasi berharap percepatan pembangunan jalan dan normalisasi sungai dapat meningkatkan kenyamanan mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi risiko banjir di sejumlah wilayah. **(den)**

Berita dari halaman 1

Nah Ini Dia

Ulah Aspana, Oknum ASN di Lebak:, yang tidak Update Status Pernikahan, diduga sengaja agar bisa leluasa selingkuh dan menikah Lagi.

Pria ini seorang oknum ASN di Puskesmas di Lebak, Banten

Siak status Asoana di data kepegawaian tidak diupdate itu diawali saat istri Aspana , Dita, saat mau konsultasi tentang Apina ke Puskesmas tersebut, namun tidak mendapat respons dari Kepala Puskesmas, sehingga dia memutuskan bertanya ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Dinkes Kabupaten Lebak.

Kemudian Dita mendapat keterangan bahwa status perkawinan ASP di data kepegawaian adalah masih lajang. Padahal dari kartu kepegawaian ASP, ASP telah ditetapkan sebagai CPNS pada bulan Maret 2019, lalu menikah dengan DT tanggal 29 Juni 2019, dan kemudian diangkat menjadi PNS (ASN) tanggal 9 Maret 2021.

Berikutnya Aspana telah menikah lagi secara siri dengan seorang wanita Supiani. Terbongkarnya masalah tersebut diawali dari terendusnya perselingkuhan Aspanna dengan Supiani yang juga mantan anak didik Aspana saat di paskibra, sejak bulan April 2021.

Hingga akhirnya pada bulan Juni 2022 Supiani mendatangi Dita (istri sah) . Pasalnya ada masalah pelik bagi Supiani. Aspana punya video-video mesum Supiani yang direkamnya saat indehoy Waktu itu Supiani diajak nikah siri oleh Aspana, tapi wanita ini selalu menolak, karena masih terlalu muda.

Karena ada ancaman penyebaran video oleh Aspana, maka Supiani mau minta bantuan istri Aspana. Dia saat itu sudah tahu, Aspana sudah menikah dengan Dita Maka Supiani mendatangi Dita, dan meminta agar video-video mesum Supiani dengan Aspana dihapus dari HP Aspana karena pria Aspana itu selalu mengancam Supiani akan menyebarkan video-video tersebut. Supiani sendiri mengaku akhirnya, mau menikah siri setelah sering diancam sebar video mesum tersebut.

Karena penasaran, Dita kemudian mencari dan akhirnya menemukan video-video mesum dimaksud di HP suaminya, Aspana.

Maka terbongkarlah selingkuh dan akal bulus Aspana. Dita sendiri masih diam-diam saja. Setelah mendapati bukti-bukti sahih perselingkuhan suaminya dangan Supiani, Dita kemudian mendatangi Puskesmas tempat suami kerja, , BPSDM dan Dinkes Kabupaten Lebak sehingga Dita tahu bahwa dia dan anaknya tidak pernah dimasukkan ke dalam data kepegawaian Aspana.

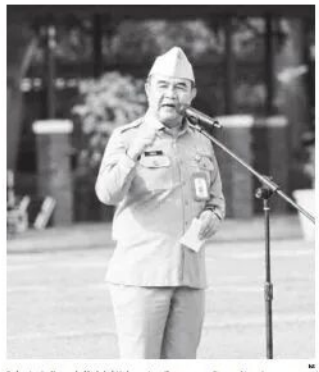
Penelusuran lebih jauh diketahui Aspaba dan Supiani telah menikah siri sekitar dua bulan sebelum itu . Menurut keterangan yang ada awalnya tidak ada penghulu yang mau menikahkan Aspana dan Supiani , namun karena ada jaminan dari orangtua Aspana ,apabila ada tuntutan di kemudian hari, akhirnya ada yang bersedia menikahkan mereka.

Setelah merasa cukup mendapat keterangan serta bukti perselingkuhan hingga pernikahan sirri antara Aspana dan Supiani, Dita , melaporkan secara resmi ke Polres Lebak, Senin (24/10/2022). Dita berharap Polres Lebak segera menindaklanjuti laporan kliennya.

"Bukti-bukti sudah cukup lah saya rasa, termasuk video-video mesum Apana dan Supiani juga sudah diserahkan ke pihak Polres Lebak. Saya pikir tidak ada alasan untuk berlama-lama menindaklanjuti laporan ini, "katanya

Sselain itu, pihak Dita juga melaporkan selain masalah perselingkuhan dan pernikahan sirri Aspana yang seorang ASN, ada masalah lain yang serius, yaitu tidak diupdate-nya status pernikahan Aspana di data kepegawaian.

Hal itu merupakan pelanggaran serius, karena ada kewajiban update data kepegawaian PNS. **(Winoto Anung)**



Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja.

ASN Kabupaten Tangerang Diminta Jaga Integritas

TANGERANG (Poskota) - Setelah dilakukan rotasi dan mutasi jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Tangerang, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja meminta agar para ASN jaga integritas dengan memberikan pelayanan yang cepat,humanis, responsif, dan bebas dari pungutan liar.

"Kepada Bapak dan Ibu yang baru saja berpindah, berotasi, maupun mendapat promosi, kami ucapkan selamat. Selamat bekerja dengan baik bersama tantangan yang baru dan semangat yang baru dalam mengemban amanah ini," katanya, Selasa (3/11).

Menurut Soma, seluruh ASN harus menjaga dan memegang teguh sumpah janjinya pada saat dilantik, serta mengedepankan koordinasi internal yang solid dalam menjalankan tugas kedinasan.

"Memasuki triwulan akhir tahun anggaran 2026, Soma Atmaja juga menyampaikan beberapa poin arahan penting dari Bupati Tangerang, untuk ditindaklanjuti secara cepat oleh seluruh perangkat daerah," ungkapnya.

Lebih lanjut, Soma menegaskan, setiap OPD diinstruksikan aktif merespon dan menyelesaikan aduan, laporan, maupun aspirasi masyarakat baik yang disampaikan langsung secara resmi maupun yang mengemuka melalui saluran media sosial.

"Ingat sumpah janji kita sebagai PNS untuk menjaga kehormatan, setia kepada Pancasila dan UUD 1945. Di balik setiap jabatan ada rahasia jabatan dan rahasia dinas. Jika ada hal yang perlu dikoordinasikan, lakukan secara internal di dinas masing-masing demi kelancaran tugas," pungkasnya. **(ver)**

Bocah 7 Tahun di Lebak Diduga Jadi Korban Pencabulan

❍ Alami Pendarahan hingga Dilarikan ke Rumah Sakit

LEBAK (Poskota) - Seorang anak perempuan berusia sekitar tujuh tahun di Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Banten, diduga menjadi korban pencabulan oleh seorang pria berinisial RB (50), Selasa (3/11).

Akibat dugaan peristiwa tersebut, korban mengalami pendarahan hingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

Sementara itu, pria yang diduga sebagai pelaku telah diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres Lebak.

Panit Opsnal I Polsek Warunggunung, Ipda Agus Sulistyo, membenarkan adanya dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak tersebut. Polisi bergerak setelah menerima laporan dari masyarakat.

"Benar, ada dugaan pencabulan. Korban masih dalam pemeriksaan. Untuk penanganan lebih lanjut dilimpahkan ke Unit PPA Polres Lebak," ungkapnya kepada wartawan.

Agus menjelaskan, setelah menerima informasi dari warga, petugas langsung mendatangi lokasi kejadian. Polisi kemudian mengamankan pria yang diduga sebagai pelaku dan membawanya ke Mapolres Lebak.

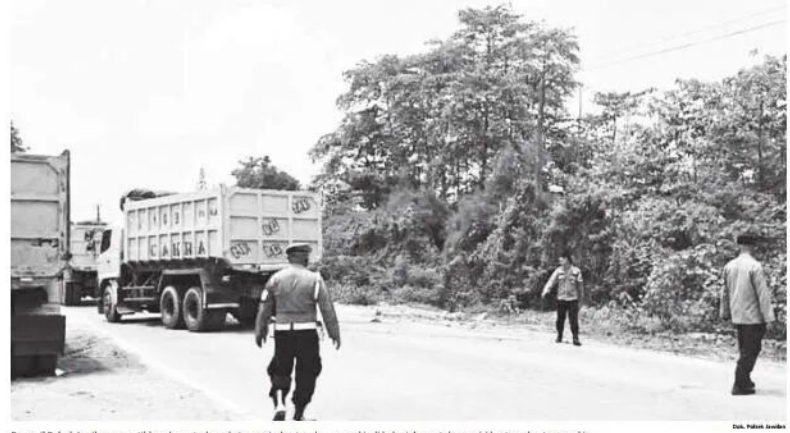
Menurutnya, pengamanan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya aksi main hakim sendiri oleh masyarakat.

"Yang diduga sebagai pelaku langsung kami bawa ke Polres Lebak untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Korban juga kami bawa ke rumah sakit setelah berkoordinasi dengan puskesmas setempat," ujarnya.

Kepala Desa Banjarsari, Jaro Daud, turut membenarkan adanya peristiwa tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya, dugaan pencabulan itu pertama kali diketahui warga sebelum akhirnya dilaporkan kepada pihak kepolisian.

"Kondisi korban cukup memprihatinkan lantaran mengalami pendarahan sehingga harus mendapatkan penanganan medis di rumah sakit," tuturnya.

Pria berinisial RB yang diamankan polisi diketahui merupakan warga setempat. Namun, kronologi lengkap kejadian, termasuk dugaan bagaimana peristiwa tersebut berlangsung, masih didalami oleh aparat kepolisian. **(fat)**



Personil Polsek Jawilan menertibkan dump truk angkutan pasir dan tanah yang parkir di bahu jalan untuk mengisi kantong-kantong parkir.

Dok. Polsek Jawilan

Polsek Jawilan Tertibkan Dump Truk yang Parkir di Bahu Jalan Raya Cikande-Rangkasbitung

JAWILAN (Poskota) – Personel Polsek Jawilan, Polres Serang, menertibkan kendaraan dump truk pengangkut tanah dan pasir yang parkir di sepanjang Jalan Raya Cikande-Rangkasbitung, tepatnya di Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Selasa (3/11).

Penertiban dilakukan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas sekaligus menjaga kelancaran arus kendaraan. Kegiatan tersebut juga merupakan tindak lanjut arahan Kapolres Serang AKBP Moehamad Probandono Bobby Danuardi dalam pelaksanaan program Pagelaran Cepat Anggota Kepolisian (PECAK) Kapolda Banten.

Dalam kegiatan itu, personel Polsek Jawilan menyisir sejumlah lokasi yang kerap dijadikan tempat parkir dump truk pengangkut tanah dan pasir. Kendaraan yang sebelumnya parkir di bahu jalan diarahkan untuk masuk ke kantong-kantong parkir yang telah disediakan.

Kapolsek Jawilan AKP Erwan Nurwanda menegaskan, penertiban dilakukan untuk mengantisipasi potensi kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan besar yang berhenti atau parkir di bahu jalan.

"Kami menertibkan kendaraan dump truk pengangkut tanah dan pasir yang parkir di bahu jalan agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Seluruh kendaraan kami arahkan untuk menempati kantong-kantong parkir yang telah disediakan," ujar Erwan.

Selain menertibkan kendaraan, petugas juga memberikan imbauan kepada para pengemudi agar mematuhi ketentuan jam operasional kendaraan angkutan tanah dan pasir sesuai aturan yang berlaku.

Menurut Erwan, kepatuhan pengemudi terhadap aturan lalu lintas sangat penting untuk menjaga keselamatan pengguna jalan lainnya. Hal itu juga diperlukan guna mencegah kemacetan serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Kami mengimbau seluruh pengemudi agar tidak memarkirkan kendaraan di bahu jalan dan selalu mematuhi ketentuan jam operasional kendaraan angkutan tanah dan pasir sesuai aturan yang berlaku.

Menurut Erwan, kepatuhan pengemudi terhadap aturan lalu lintas sangat penting untuk menjaga keselamatan pengguna jalan lainnya. Hal itu juga diperlukan guna mencegah kemacetan serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Kami mengimbau seluruh pengemudi agar tidak memarkirkan kendaraan di bahu jalan dan selalu mematuhi ketentuan jam operasional. Jangan sampai aktivitas kendaraan angkutan justru membahayakan pengguna jalan lainnya," tegasnya.

Erwan menambahkan, Polsek Jawilan akan terus melakukan pemantauan dan penertiban secara berkala untuk memastikan kondisi lalu lintas di wilayah hukumnya tetap aman, tertib, dan lancar. **(rah)**

Tujuh Dapur MBG di Malingping Berhenti Beroperasi Sementara

LLEBAK (Poskota) – Sebanyak tujuh dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten, berhenti beroperasi sementara sejak Senin (2/11).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, penghentian operasional tersebut dilakukan setelah Badan Gizi Nasional (BGN) menjatuhkan sanksi administratif kepada tujuh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena tidak menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH).

Sanksi tersebut tertuang dalam surat BGN Nomor 5359/D.TWS/10/2026 tentang Pemberhentian Khusus (Sanksi Administrasi Penyampaian LPDH).

Akibatnya, pendistribusian makanan bergizi kepada para penerima manfaat untuk sementara waktu tidak dapat dilakukan. Penerima manfaat yang terdampak meliputi siswa, ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), hingga balita non-PAUD (B3).

Berdasarkan data yang dihimpun, dari total 10 dapur MBG yang beroperasi di Kecamatan Malingping, hanya tiga dapur yang masih melayani penerima manfaat.

Ketiga dapur tersebut adalah SPPG Cilangkahan 3, SPPG Cilangkahan 4, dan SPPG Sumberwaras 2.

Sementara itu, tujuh dapur yang berhenti beroperasi meliputi SPPG Lebak Cilangkahan 1, SPPG Cilangkahan 2, SPPG Pagelaran, SPPG Rahong, SPPG Malingping Utara, SPPG Sumberwaras 1, dan SPPG Sukaraja.

Salah satu mitra program MBG di Cilangkahan, Aja, membenarkan adanya penghentian sementara pendistribusian makanan bergizi tersebut.

"Iya dari hari Senin kemarin tidak operasi, karena ada sanksi administratif khusus tidak mengisi LPDH," ungkapnya kepada wartawan, Selasa (3/11/2026).

Menurut Aja, penghentian sementara tersebut terjadi akibat kelalaian Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dalam mengisi LPDH.

"SPPI-nya itu lalai, saya juga marah sama SPPI-nya. Disangka tidak penting, padahal sudah ditegaskan oleh Waka BGN tanggal 5 Oktober kemarin kalau tidak salah mah," katanya.

Aja menyebutkan, dari 10 dapur MBG di Kecamatan Malingping, hanya tiga SPPG yang masih dapat beroperasi.

"Yang lolos cuma tiga SPPG," ucapnya. **(fat)**

Paus Sepanjang 22 Meter Terdampar di Pantai Ciapu Pandeglang

PANDEGLANG (Poskota) – Bangkai seekor paus berukuran besar ditemukan terdampar di pesisir Pantai Kampung Ciapu, Desa Tanjungan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, bangkai paus tersebut ditemukan pada Senin (2/11). Mamalia laut itu diperkirakan memiliki panjang sekitar 22 meter dengan berat kurang lebih 900 kilogram.

Penemuan paus dalam kondisi mati tersebut sontak menarik perhatian warga yang berdatangan ke lokasi.

Personel Kapal XXIII-1004 Polairud Binuangeun langsung mendatangi lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat.

Komandan Kapal XXIII-1004 Polairud Binuangeun, Bripka Tomi Triawan, mengatakan paus tersebut pertama kali diketahui warga sekitar pukul 14.30 WIB.

"Kami tadi telah menerima informasi dari warga masyarakat Kampung Ciapu, Desa Tanjungan, Kecamatan Cikeusik, yang melihat ikan besar tersebut sekitar pukul 14.30 WIB," ungkapnya kepada wartawan, Selasa (3/11).

Setelah menerima laporan, petugas langsung menuju tempat kejadian perkara (TKP). Setibanya di lokasi, petugas memastikan bahwa hewan laut yang terdampar tersebut merupakan seekor paus berukuran besar dalam kondisi mati.

"Kami berangkat menuju tempat kejadian perkara. Setelah tiba, benar ditemukan jenis ikan paus yang cukup besar dalam kondisi terdampar, dengan ukuran panjang kurang lebih 22 meter dan berat sekitar 900 kilogram," katanya.

Tomi menjelaskan, pihaknya kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (PSPL) Serang untuk menangani dan mengevakuasi bangkai paus tersebut.

Berdasarkan informasi dari pihak PSPL Serang, paus yang ditemukan di pesisir Pantai Ciapu tersebut merupakan satwa laut yang dilindungi.

"Informasi dari pihak PSPL Serang, paus tersebut merupakan jenis yang dilindungi," katanya.

Saat ini, bangkai paus tersebut telah ditangani dan dievakuasi oleh pihak terkait. **(fat)**

Tiga Pelajar SMK Sabet Warga dengan Samurai

❍ Diduga Salah Sasaran

PONTANG (Poskota) – Tiga remaja yang masih berstatus pelajar SMK diduga menganiaya Mutaqin (36), warga Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka robek pada bagian dahi sebelah kiri setelah terkena senjata tajam jenis samurai. Korban kemudian mendapatkan penanganan medis di Klinik dr. Eddi Linduk.

Ketiga terduga pelaku berhasil diamankan personel Polsek Pontang, Polres Serang, kurang dari 24 jam setelah kejadian. Polisi juga menyita sepeda motor yang digunakan para terduga pelaku saat melakukan penganiayaan. Peristiwa tersebut sebelumnya sempat viral di media sosial.

Ketiga terduga pelaku masing-masing berinisial TA (16), warga Kecamatan Tirtayasa, serta FA (16) dan WA (17), yang merupakan warga Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang.

Kapolsek Pontang,AKP Muklas menjelaskan, penganiayaan tersebut terjadi pada Senin (2/11) sekitar pukul 18.15 WIB. Lokasi kejadian berada di depan Kantor PDAM, Jalan Linduk, Kampung Sukaratu, Desa Linduk, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang.

Menurut Muklas, kejadian bermula saat korban mengendarai sepeda motor dari arah Pontang menuju Linduk. Ketika melintas di depan Kantor PDAM, korban berpapasan dengan tiga remaja yang berboncengan menggunakan satu sepeda motor. Mereka diduga berkendara secara ugal-ugalan sambil mengejar kendaraan lain di depannya.

"Sesampainya di depan Kantor PDAM, sepeda motor yang dikejar masuk ke area kantor. Sementara tiga remaja tersebut berhenti di depan kantor PDAM. Karena penasaran, korban kemudian menghentikan kendaraannya dan bertanya kepada mereka, 'Ada apa?'," jelas Muklas kepada Poskota.

Namun, pertanyaan korban tidak mendapat jawaban. Salah seorang dari ketiga remaja tersebut justru mengeluarkan senjata tajam jenis samurai sepanjang sekitar satu meter dari dalam tasnya. Saat mengeluarkan senjata tersebut, salah seorang terduga pelaku berteriak "maling" dan diduga hendak mengejar dua orang yang sebelumnya masuk ke area Kantor PDAM.

Nahas, samurai tersebut justru mengenai dahi sebelah kiri korban hingga menyebabkan luka robek dan mengeluarkan darah. Korban kemudian meminta pertolongan warga sekitar. Tidak lama berselang, korban pulang dan diantar adiknya ke klinik terdekat untuk mendapatkan penanganan medis.

Muklas mengatakan, setelah menerima informasi mengenai kejadian tersebut, pihaknya langsung melakukan penyelidikan. Terlebih, video penganiayaan itu telah beredar luas di media sosial Instagram.

"Begitu menerima informasi adanya video penganiayaan yang viral di media sosial, anggota kami langsung mendatangi lokasi kejadian, melakukan pengecekan tempat kejadian perkara, mengumpulkan keterangan saksi, serta berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Serang. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 24 jam ketiga terduga pelaku berhasil kami amankan berikut sepeda motor yang digunakan saat kejadian," ungkap Muklas.

Saat ini, ketiga terduga pelaku telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami motif penganiayaan tersebut, termasuk dugaan bahwa korban merupakan sasaran yang keliru dalam peristiwa itu. **(rah)**



Dok. Polsek Pontang

Ketiga remaja terduga pelaku penganiayaan diamankan di Mapolsek Pontang.

Ayu Ting Ting Makan Bakso dan Cilok Sebelum Manggung

Tak Khawatir Suara Rusak

JAKARTA (Poskota) - Pedangdut Ayu Ting Ting membagikan kebiasaannya dalam menjaga kualitas suara sebelum tampil bernyanyi di atas panggung. Berbeda dengan kebanyakan penyanyi yang memiliki pantangan makanan tertentu, Ayu mengaku tidak terlalu membatasi menu makanan yang dikonsumsinya.

Pelantun lagu "Sambalado" tersebut bahkan tetap menikmati makanan favoritnya, seperti bakso hingga cilok, tanpa merasa khawatir akan memengaruhi kualitas suaranya maupun bentuk tubuhnya.

Hal itu diungkapkan Ayu saat ditemui awak media di sela-sela persiapannya menjalani sesi general rehearsal (GR) untuk sebuah acara peluncuran.

Kepada awak media, Ayu mengaku kerap mendengar saran agar penyanyi menghindari makanan tertentu, termasuk bakso, sebelum tampil demi menjaga performa vokal.

"Sebenarnya sih kalau mau nyanyi, biasanya sih kalau orang-orang bilang, 'Jangan suka pada makan bakso,' gitu katanya," ujar Ayu Ting Ting di kawasan Tendean, Mampang, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Meski mengetahui adanya berbagai pantangan makanan yang kerap dikaitkan dengan profesi penyanyi, pedangdut asal Depok tersebut mengaku tidak terlalu memikirkannya.

"Tapi kalau aku mah makan-makan aja, tetap bagus insyaallah suaranya, amin," kata Ayu.

Setelah menjawab pertanyaan seputar kebiasaan makannya, Ayu kemudian berpamitan untuk melanjutkan persiapan penampilannya.

Ia juga mengajak para penggemar untuk datang dan menyaksikan penampilannya dalam acara tersebut.

"Harus datang! Sekarang juga nonton aku, aku lagi mau launching. Let's go! Bye!" pungkas Ayu. **(tog)**



Maell Lee Talak Cerai Sang Istri

Anggita Oktaviani: Mungkin Belum Jodoh

JAKARTA (Poskota) - Kabar keretakan rumah tangga datang dari YouTuber sekaligus komedian Maell Lee. Ia secara terbuka mengonfirmasi tengah menjalani proses perceraian dengan istrinya, Anggita Oktaviani, setelah mendatangi Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Selasa (3/11).

Momen tersebut terekam saat Maell keluar dari ruang sidang. Didampingi seorang rekannya, Maell awalnya enggan banyak berkomentar ketika awak media menanyakan maksud kedatangannya ke pengadilan.

Namun, setelah terus ditanya mengenai agenda persidangan yang dijalaninya, Maell akhirnya mengungkapkan bahwa kedatangannya berkaitan dengan proses perceraian dengan sang istri.

"Agendanya... saya mentalak istri saya. Sudah, terima kasih," ujar Maell Lee di hadapan awak media.

Pernyataan singkat tersebut langsung menarik perhatian publik. Pasalnya, ini bukan kali pertama kehidupan rumah tangga komedian tersebut menjadi sorotan terkait persoalan perceraian.

Saat ditanya mengenai alasan di balik keputusannya mengakhiri pernikahan, Maell memilih tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia justru meminta awak media menanyakan hal tersebut kepada pihak kuasa hukumnya.

"Tanya sama beliau (pengacara), beliau (yang) tahu," jawab Maell.

Ketika kembali ditanya apakah terdapat persoalan serius yang tidak bisa lagi ditoleransi dalam rumah tangganya, Maell tetap enggan mengungkapkan permasalahan pribadi tersebut.

"Enggak, itu beliau yang lebih tahu," imbuhnya.



Mengenai kelanjutan proses perceraian, Maell mengisyaratkan kemungkinan tidak akan selalu menghadiri persidangan. Ia mengaku telah menyerahkan penanganan perkara tersebut sepenuhnya kepada kuasa hukumnya.

Maell pun berharap seluruh proses perceraian dapat berjalan lancar.

"Enggak (hadir terus), saya udah nyerahin ke kuasa hukum saya tadi. Semuanya diserahin ke beliau. Minta doanya dilancarkan, amin," tutur Maell.

Tak lama setelah Maell meninggalkan ruang persidangan, Anggita Oktaviani juga terlihat keluar dari PA Jakarta Selatan. Mengenakan kacamata dan masker, Anggita memilih tidak banyak berkomentar mengenai proses perceraian yang tengah dihadapinya.

Ia hanya menyampaikan bahwa kemungkinan dirinya dan Maell memang tidak berjodoh.

"Mungkin belum jodoh mas, terima kasih ya, maaf," katanya sembari berjalan menuju mobil. **(tog)**

IKLAN BARIS

TARIF IKLAN POSKOTA

Iklan umum/Display BW: Rp 40.000/mmk

Iklan kolom Uk. 50 s/d 450 mmk: Rp.20.000/mmk.

(Pengumuman, Laporan Keuangan, Cong Ad, Dukacita/ Iklan Keluarga)

Iklan warna:
Full colour Rp 60.000/mmk.
Advertorial (FC) Rp 60.000/mmk
Advertorial (BW) Rp 40.000/mmk.

Iklan baris umum:
Rp 17.000/baris
sudah termasuk PPN.
minimal 5 baris, maksimal 10 baris.
1 Baris = 26 karakter, termasuk spasi, dan tanda baca.

Iklan mini khusus dan bergambar
Rp 100.000,- = 125 karakter

Iklan Lowongan
Rp 30.000/baris
minimal 5 baris maksimal 10 baris
1 baris = 30 karakter termasuk spasi dan tanda baca.

Iklan mini salah muat atau tidak termuat, semata-mata karena kesalahan teknis.
Teks iklan tanggungjawab pemasang/ bukan tanggungjawab penerbit.

Alamat Tata Usaha/Iklan/Keagenan:
Jl. Bang Pitung No. 22
Sukabumi Utara Kebon Jeruk Jakbar
Telepon: 021-22129129 (Hunting)

No. REKENING Pos Kota
Bank BNI 46 Cab. Harmoni PT Media Antarkota Jaya Norek: 182.900.75
Bank Mandiri Cab.Duta Merlin PT Media Antarkota Jaya Norek: 121.000.3031.428
Bank BCA Cab.Gajah Mada PT Media Antarkota Jaya Norek: 012.303.4314

Halaman khusus mini (island adv)
- Display Pulau BW Rp 40.000/mmk (min 450mmk)
- Display Pulau FC Rp 60.000/mmk (min 1080mmk)

Biro Jasa

CV.MARANFI URUS; STNK, SIM, BBN, Mutasi, Akte Notaris, BK Kehakiman, PT, CV, DLL. (AntarJempuVDelessal Bayar) Hub: 081510351919

Hiburan

WAYANG MILENIAL INDONESIA
- Pentas di Marakas Square
- Pondok Ungu Permai Bekasi
- Kl Gunarto Gunotalljendro
- Anoman Takon Bopo
- Tgl 07 Nov 2026 jam 20.00

Kehilangan

BPKB MBL Mitsubishith2018 b9479jn. A/n h,Muhamad Goleh warna: orange noka: mhmfm517aak003992 nosin: 6d16fy3336

HILANG BPKB Honda Vario 125 Nopol B4744TDB Noka: MH1JFK110EK179247 Nosin: JFK1E1177442 A/N Kadek Heri Pradipta

HILANG BPKB MDI Toyota Sienta 1.5 V CVT 2016, coklatmet, noka :MHFZ28H3X G0001573, nosin: 2NRX 041496, An. AGUNG SUBAGIO

HILANG BPKB Mobil Futura B1502KOY Noka: MHYESL41SDJ520670 Nosin: G15AID922644 An Henny Theodora

HILANG BPKB Mobil Honda Jazz GE8 1,5 E MT, Nopol B 1948 UZR, Noka: MHRGE8760DJ302876, Nosin: L15A77740564, atas nama PT. Gigantika Pratama Prima

HILANG AJB No. 1706/2008, Luas 100 M2, Kel. Gondrong, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, An. Napsian, Dpd.

HILANG BPKB Motor Honda PCX V1J03G32L2, Nopol B 3521 CKZ, Noka: MH1KFE11XDK198812, Nosin: KFE1E1198959, An. Dewi Andriyani.

HILANG BPKB Motor Kawasaki, B4343KOD, Nomor Rangka: JKAEX650KHDA08390, Nomor Mesin: ER650AEX05553, atas nama Nursuasti

HILANG BPKB Toyota Veloz Th.2015 nopol B 2320 BTN No rangka MHKM5FA4JFK002962 No mesin 2NRFS09241 A. n. Irwan Suglanto

HILANG SHM No. 01721 Desa Bantargebang Kab. Bekasi An. Haji Muksin Lt. 720m2

HILANG GIRIK A/N Polong Blh Kutep no. 510 Blok 131/A/ III/D Luas: 89m2 Duren Tiga, Mampang Prapatan Pasar Minggu Jakarta Selatan

HILANGAN KIR : b9120uxx jkt2310094 a.n pt. limitlintas mega h b9564pxr jkt1509686 a.n pt. nippon konpo lindonesia b9108uex jkt2110419 a.n pt. mandiri global trans , b9861txt jkt1829439 a.n pt. citra hutata persada, b9269pal jkt1724506 a.n pt. acset Indonusa tbk

HLG AJB No.1.581/Curug tgl 25-11-2015 L.125m2 Kohir C.1127 P.84 D.II Blk 033 d/a Kp.Babakan Binong Curug Tgrg Pembeli a.n NURLELAH

TELAH HILANG SHGB No. 2095/Cengkareng Barat, luas 325m², a/n Tan Sui Jin / Sui Jin

HLG KARTU klr : b9530uvy jkt2013002, b9529uvy jkt2012935 PT Penguin Trans. jkt357207 PT Samudera P

KEHILANGAN KIR B9860 txt jkt1828758 PT citra hutata persada Tempelan jkt1239830 A/n. Alex Hermanto m

KIR HILANG B 9707 PYT. JKT 805969 B 9437 SEU. JKT 2013323 B 9630 UEM. JKT 1717222 B 9151 PEI. JKT 1500654 B 9932 TEH. JKT 1423255

TELAH HILANG SHM No. 528 luas tanah 1.060m² a.n Nurtdjah Nurdin ber lokasi di jalan Bangka IX Nomor 39B RT. 05 RW.12 Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan Kota Adm Jakarta Selatan. Bagi yang menemukan, mohon menghubungi 081212000187

RSK DIMAKAN rayap SHM No.7378/ Kutajaya NIB:23384 L.72m2 d/a Kel.Kutajaya Kec.Pasar Kemis Kab. Tangerang a.n GUNAWAN



ADA DICARI Mobil Segala Jenis.Tahun 1995 s/d 2026. BPKB Asli/Duplikat Hub. Mas Tio 0812 890 7676 / 0812 857 60800 Tangerang

Tanah Dijual

DIJUAL TANAH 4000m2 SHM Jababeka Cikarang, Jl. Industri Raya. Minat Hubungi WhatsApp 0812-18009788/ 08151631511

Pengumuman

BERDSRKN KEPUTUSAN Scr Sirkuler Sbgt Penggnti RUPS PT ANUGRAH PALM LESTARI, brkddkn di Jakarta Pusat, tgl 02 November 2026 dgn acr: Pengambilalihan saham perseroan kpd phk lain dan perubahan susunan pengurus perseroan, hrp yg brkpentingn hub. Direksi perseroan

Pengumuman

BRDSRKN KPTSN Sirkuler Pggnt RUPS PT GLOBAL SUKSES KREASI, brkddkn di Kt Bekasi, tgl 02 Okt 2026 acr:Prohn Kddkn, Almt Ikp,ssnn pgrus, Pnysualan KBLI 2025, Pngalihn saham 100%, bhw prs tdk mmlk htg kpd phk lain & tdk dnytkn pailit pgdln,yg brkpntgn hub Direksi

Nyok dipasang iklan mini khusus POSKOTA
- Bergambar
- Berkotak
- Hanya 100rb max 125 karakter

TOYOTA





TOYOTA KIJANG Grand, Short- KF40-1995 Kon bgs,plat F-STNK 2029,Pjk Des 25(bs dprpjng), Jual Sgr.Serpong Utara

Kehilangan

TELAH HILANG SHM No. 09208, Luas: 145m2, [illegible] tak Jl. Kenangan, Kp. [illegible] T 004/ 006 Atas nama [illegible] YAH

Pengumuman

PENJUALAN BAWAH tangan Eksekusi Jaminan Fidusia : Daihatsu Ayla 2025 Daihatsu Ayla 2026 Daihatsu Sigra 2023

BRDSRKN AKTA Pembu baran No. 9,tgl 01-09-2026 yg dibuat oleh JIHAN KHOIRINI, SH, MKn Notaris Kab. Bndg Barat. Bhw PT SIDOMANDIRI JAYA.

PASANG IKLAN BARIS POSKOTA
GRATIS DI POSKOTA ONLINE
Hanya 1x Bayar Dapat Pemuatan di 3 Media !!!
Harian Poskota, Poskota.co.id Dan E-Paper
Daftar Biro Di Wilayah Anda

JAKARTA SELATAN

ALHAS ADV
alamat : Jl.Warung Jati Timur 2 no 40 Rt.07/04 kalibata jaksel 12740. HP.. 0856.9283.3907

ADLINK
Alamat: JLRadio Dalam No 18 Kebayoran Jaksel PhFax: 021-89131723 Hp/ WA: 0817-868-729 Email: biroiklan_koran@yahoo.co.id

DELIA MITRA UTAMA
Jl. Kebon Mangga 3 Kebayoran Lama Jaksel Ph.021-7250804 - 08129465958 Email: dilanbaris@yahoo.com

PT. TIRTAMAYA CIPTA PRATAMA
Alamat : Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 71 Ph: 021 8307824 / Hp/WA: - Email: tirtamaya2006@yahoo.com / tirtamaya2006@gmail.com

WIDYA PAN KARYA (WPK)
Alamat : Jl. Tebet Utara 1 RT. 005/010 No. 34C Kel. Tebet Timur Kec. Tebet Jakarta Selatan - 12820 Ph: 021 - 83795470 / 021 - 8307073 Hp: 0812 9777 279 / WA: 0856 9170 2559 Email: widyapankarya@yahoo.com

TOPAZ Adv
Alamat : JLANGGREK 1 No.24 Rt.12/Rw.01 SETIA BUDI JAKARTA SELATAN PhFax: 021-5279183 Hp: 0813.1844 9798 Email: sugengsusanto63@yahoo.com

CV.YANS SAPUTRA
Alamat : Jl. Anggrek III Rt 01/02 No 63 Jagakarsa Jaksel 12620 Hp: 0812 94001722 - 0813 15509350 Email: yans_saputraov@yahoo.co.id

CV SINAR BINTANG ADV
Alamat : Jl. Duren Tiga Raya No.11 Jakarta Selatan Hp: 0816843606 / WA: 081315980809 (Micki), 08567726480 (Ema), 085822103537 (Liny),085822100175(Andra) Email: swadeslindowisata@yahoo.com

BENA LARES
Alamat : Jl. Mampang Prapatan III Rt.08 Rw 02 No.12 Jaksel 12790 Hp: 0815.116.58117 / WA: 0815.1450.7690 Email: benalares@ymail.com

HUSEIN PADMA
Alamat: Jl Tebet Barat 6 H No 5 Jaksel Telp 021-8300005 Hp/Wa 08129401950

KEVIN LEO ADV
Alamat: JL Mampang Prapatan Rt.08 Rw 02 No.12 Jaksel 12790 Ph: 021-79182561-79167369 Hp/WA: 0815.1450.7690

CIPTA MANDIRI
Alamat : JL. PETOGOGAN II NO.19 KEBAYORAN BARU JAK-SEL PhFax - Hp/ WA: - Email: iwansusanto19@yahoo.com

TAUFAN PUTRA UTAMA
Jl. Kemandoran 2 rt. 12/03 no. 20 kebayoran lama Jaksel HP: 08129512354 phone. 5311307 Email : taufan_adv@yahoo.com

JSL
Alamat : JLSirsak Ujung No 68 Ciganjur Jagakarsa Jaksel Hubungi : Hp: 0852.1807.0000 / 0858.9126.4686 (WA) Email: talang.permana@yahoo.co.id

DIPOLA ADVERTISING
Alamat : Jl. Karang Tengah I No.50-D Lebak Bulus - Cilandak Jakarta Selatan Hp/WA: 0818 199 5507 / 08111059070 Email: donny_sf@yahoo.co.id

MITRA CIPTA FANTASI
Alamat : Ko.Kecil RT.002 RW.01 No.44 , Email:dedy.hidajat17@gmail.com Hp/WA: 087884236188 - 087877108887 .

FAJAR GEMILANG UTAMA
Jl. Batu I No. 10 Rt 003/02 Pejaten Timur, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510 HP. 0853-1800-2222

INFO IKLAN BARIS POSKOTA

PENERIMAAN IKLAN BUKA PUKUL 10.00 WIB

SENIN s/d JUMAT
Iklan Tutup pukul 18.00 WIB

SABTU
Iklan Tutup pukul 17.00 WIB.

MINGGU
Iklan Tutup pukul 16.00 WIB

*Transaksi iklan setelah pukul diatas akan diproses keesokan harinya.

Klik POSKOTA.co.id
Dapatkan
Berita Terupdate
Informasi dan peristiwa



poskotanetwork @poskotanetwork poskota poskota Official poskotanetwork

Mau Berlangganan Koran POSKOTA???
Hubungi : WA. 0811.9523.886 Telp: 021-22129129
atau Agen Koran terdekat



Mau Pasang Iklan
Di koran POSKOTA... Hubungi :
0811 8872 888 Telp : 021-22129129





Poskota/Dok. DPUPR

DPUPR Kota Depok melalui Bidang Bina Marga melakukan rekonstruksi Jalan Raya Keadilan, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Selasa (03/11/26).

Jalan Raya Keadilan Depok Ditutup hingga 21 November

DEPOK (Poskota) – Pengendara yang biasa melintasi Jalan Raya Keadilan, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, perlu mencari jalur alternatif. Pasalnya, akses jalan tersebut ditutup sementara akibat pekerjaan perbaikan berupa pengecoran yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok.

Rekayasa lalu lintas telah diberlakukan sejak 1 hingga 7 November 2026. Selanjutnya, penutupan jalan secara total dijadwalkan berlangsung pada 7-21 November 2026.

Kepala DPUPR Kota Depok, Yodi Joko Bintoro, mengatakan pengaturan lalu lintas dilakukan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sekaligus meminimalkan kepadatan kendaraan di sekitar lokasi proyek.

"Sehubungan dengan adanya pekerjaan perbaikan jalan (pengecoran), akses Jalan Raya Keadilan ditutup sementara. Rekayasa lalu lintas sudah diberlakukan dan informasi perslihan jalur juga sudah disebar melalui media sosial dan marka jalan di lapangan," ujar Yodi, Selasa (3/11).

Selama pekerjaan berlangsung, DPUPR telah menyiapkan sejumlah jalur alternatif bagi pengendara dari kedua arah.

Kendaraan dari arah Arco Sawangan menuju Cipayung diarahkan melintasi Jembatan Serong, kemudian masuk ke Jalan Al-Hikmah, Jalan Kampung Rangkapan Jaya, dan Jalan H. Kimah. Selanjutnya, pengendara dapat keluar menuju Jalan Raya Cipayung.

Sementara itu, kendaraan dari arah Cipayung atau Jembatan Serong menuju Arco/Sawangan dapat menggunakan jalur Jalan Gardu, Jalan Situ Asih, Jalan Muhasim, hingga Jalan Caringin yang terhubung dengan Jalan Raya Sawangan.

Yodi mengimbau masyarakat mematuhi rambu-rambu pengalihan arus serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Pengendara juga diminta mengatur waktu perjalanan untuk mengantisipasi potensi kemacetan selama pekerjaan berlangsung.

"Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Pembangunan ini dilakukan untuk kepentingan bersama," tutupnya.

DPUPR berharap masyarakat dapat memahami pemberlakuan rekayasa lalu lintas tersebut. Perbaikan jalan diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan setelah pekerjaan selesai. **(den)**

SDN Cipayung 4 Depok Dibobol Maling

❍ Barang Elektronik Senilai Rp60 Juta Raib

DEPOK (Poskota) – Aksi pencurian menyasar SDN Cipayung 4 di Jalan Cendana, Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Sejumlah barang elektronik dan uang milik guru raib digondol pelaku dengan total kerugian ditaksir mencapai Rp60 juta.

Pencurian yang diketahui pada Senin (2/11/2026) pagi itu menyasar empat ruangan sekolah, yakni ruang kepala sekolah, tata usaha (TU), ruang guru, dan perpustakaan.

Guru sekaligus Bendahara SDN Cipayung 4, Yeni Sumiati, mengatakan kondisi sejumlah ruangan berantakan setelah dibobol. Isi lemari, loker, hingga laci meja tampak diacak-acak pelaku yang diduga mencari barang berharga.

Barang yang hilang di antaranya delapan unit infokus, satu laptop, serta perangkat pengeras suara berikut amplifier atau mixer. Selain itu, uang pribadi milik sejumlah guru yang disimpan di laci meja juga ikut digasak.

"Di ruangan TU infokus hilang. Kalau yang di ruangan guru, laptop satu terus infokus. Infokus tujuh yang hilang kalau yang di ruangan guru. Terus yang di ruang perpus kan kita memang ada sound system ya, itu ada amplinya atau mixer-nya yang buat kegiatan di luar kelas. Dan nominal uang pribadi. Totalnya Rp 60 jutaan," ujar Yeni kepada wartawan, Selasa (3/11).

Yeni menuturkan, aksi pencurian tersebut pertama kali diketahui penjaga sekolah bernama Asmat sekitar pukul 05.25 WIB. Saat tiba di sekolah, Asmat melihat sejumlah pintu ruangan sudah dalam kondisi dibobol.

Karena khawatir masih ada pelaku di dalam, Asmat tidak berani masuk dan memilih menghubungi Yeni serta kepala sekolah. Setelah kepala sekolah dan sejumlah guru tiba sekitar pukul 06.00 WIB, mereka bersama-sama memeriksa kondisi bangunan. Saat itu, gerbang utama dan sejumlah ruangan masih dalam keadaan tertutup.

"Karena anak-anak juga udah pada kumpul di depan gerbang sekolah, kita buka bareng-bareng tanpa menyentuh apa pun," kata Yeni.

Pihak sekolah kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian. Petugas dari Polsek Pancoran Mas, tim identifikasi Polres Metro Depok, serta Unit K9 Satwa Kelapa Dua datang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Dalam penyelidikan, polisi turut mengerahkan anjing pelacak untuk menelusuri jejak pelaku. Menurut Yeni, anjing tersebut membawa petugas hingga ke area kebun di belakang sekolah yang berjarak sekitar 200 meter dari bangunan.

"Sampai titik terakhirnya sampai di belakang kebun sekolah. Kan di situ kan kebun ya, belakang sekolah, sampai di sana berhentinya anjing. Jaraknya sekitar 200 meter dari sekolah," tuturnya.

Pihak sekolah menduga pelaku masuk dengan cara memanjat pagar di samping ruang kepala sekolah. Dugaan tersebut muncul karena saat kejadian diketahui, gerbang utama sekolah masih dalam keadaan terkunci. **(den)**

Jembatan Melati Raya Depok Diusulkan Direvitalisasi

❍ Cegah Banjir di SMP Negeri 2



Poskota/Dok. DPUPR

DPUPR melalui Bidang Sumber Daya Air (SDA) telah melaksanakan normalisasi saluran di sekitar SMP Negeri 2 Depok, beberapa waktu lalu.

DEPOK (Poskota) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok berencana mengusulkan revitalisasi Jembatan Jalan Melati Raya, Kecamatan Pancoran Mas. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mencegah banjir yang sebelumnya sempat masuk ke lingkungan SMP Negeri 2 Depok saat hujan deras.

Kepala DPUPR Kota Depok, Yodi Joko Bintoro, mengatakan usulan revitalisasi jembatan tersebut direncanakan pada awal 2027. Pembiayaannya kemungkinan menggunakan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT).

"Insyaallah awal tahun depan akan kami usulkan untuk revitalisasi jembatan di Jalan Melati Raya. Kemungkinan menggunakan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT)," ujar Yodi, Selasa (3/11).

Memurutnya, revitalisasi diperlukan untuk mendukung kelancaran aliran air di saluran atau kali yang berada di depan SMPN 2 Depok. Terlebih, kawasan tersebut sempat terdampak banjir setelah hujan lebat sekitar sepekan lalu.

Sambil menunggu rencana revitalisasi, DPUPR telah melakukan penanganan sementara melalui normalisasi saluran air di sekitar sekolah. Pengerjaan dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Sumber Daya Air (SDA).

Yodi menjelaskan, banjir terjadi akibat tingginya debit air saat hujan deras. Kondisi tersebut diperparah oleh tumpukan sampah dan sedimentasi pasir yang menyumbat saluran sehingga aliran air tidak berjalan optimal.

"Sudah dilakukan normalisasi oleh Satuan Tugas (Satgas) Sumber Daya Air (SDA) beberapa waktu lalu. Untuk penanganan lanjutan, akan dilakukan pengusulan revitalisasi jembatan di Jalan Melati Raya (hilir saluran/kali yang ada di depan SMPN 2 Depok)," jelasnya.

Ia berharap normalisasi saluran dan rencana pembenahan jembatan dapat menjadi solusi untuk mengurangi risiko genangan maupun banjir di lingkungan sekolah.

PUPR, lanjut Yodi, akan terus mengupayakan penanganan agar kejadian serupa tidak kembali mengganggu aktivitas belajar mengajar di SMPN 2 Depok. "Masih terus kami upayakan penanganan tersebut. Mudah-mudahan, banjir tidak kembali lagi," pungkasnya. **(den)**

Lansia Tewas Tertabrak KRL di Perlintasan Tanahsereal

BOGOR (Poskota) – Nasib tragis dialami MRS, pria berusia 83 tahun yang meninggal dunia setelah terserempet kereta rel listrik (KRL) Commuter Line di kawasan Pondok Rumput, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanahsareal, Kota Bogor, Selasa (3/11) pagi.

Korban diduga tidak mengetahui adanya kereta yang melintas dari arah belakang ketika berjalan di bantaran rel. Berdasarkan keterangan keluarga dan tetangga, korban diketahui mengalami gangguan pendengaran serta pikun.

Kapolsek Tanahsareal Kompol Sonson Sudarsono mengatakan kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 09.45 WIB. Saat itu, korban sedang berjalan kaki di pinggir rel kereta api.

Menurut keterangan saksi, sebuah KRL yang melaju dari arah Bogor menuju Jakarta tiba-tiba melintas dan menyerempet tubuh korban.

"Untuk kronologi dari pihak saksi di lokasi bahwa yang bersangkutan sedang berjalan di bantaran rel kereta, kemudian tiba-tiba ada kereta yang dari arah Bogor menuju Jakarta, kemudian korban tersebut terserempet," kata Sonson.

Sonson menjelaskan, korban merupakan warga asli Kampung Pondok Rumput. Informasi dari pihak keluarga dan tetangga menyebutkan MRS memiliki gangguan pendengaran.

Usai kejadian, tim Inafis Polresta Bogor Kota mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengevakuasi jenazah.

Pihak keluarga meminta agar jenazah langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Mereka juga menyatakan menolak dilakukan autopsi. "Untuk selanjutnya korban atas koordinasi dan keinginan pihak keluarga, kemudian dibawa juga untuk dilakukan pemakaman," ujar Sonson.

Sementara itu, Ketua RW setempat, Sumardi, mengatakan KRL sempat berhenti setelah masinis mengetahui adanya korban di sekitar jalur kereta. Masinis kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada warga.

Karena posisi korban berada di tengah rel, warga sempat menggeser jenazah ke tempat yang lebih aman.

"Kereta tadi sempat berhenti, tapi posisi di ekor (melewati posisi korban). Masinis di sana ngasih tahu bahwa tadi ada yang tertabrak gitu. Sempat berhenti, ngasih tahu ke warga, karena memang tadi kondisinya sepi di sini," ungkap Sumardi.

Sumardi menambahkan, korban dikenal mengalami gangguan ingatan dan pendengaran. Korban juga kerap berjalan seorang diri di sekitar lingkungan tempat tinggalnya.

"Ya memang (korban) sudah pikun, kesehariannya memang sering mondar-mandir gitu. Kalau di sini sih jarang, biasanya di sebelah sana, jarang sampai nyebrang rel biasanya," tuturnya. **(den)**

Rumah Kontrakan Terbakar Saat Ditinggal Penghuni Kondangan

BOGOR (Poskota) – Satu unit rumah kontrakan di Kampung Gudang, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, terbakar pada Selasa (3/11) sekitar pukul 15.00 WIB. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik.

Kasi Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Bogor, Abiyyun, mengatakan rumah tersebut dalam keadaan kosong saat kebakaran terjadi. Penghuninya sedang menghadiri acara kondangan di wilayah Leuwiliang.

"Terjadi kebakaran di Kampung Gudang, Kelurahan Gudang. Yang terbakar ini rumah kontrakan dalam keadaan kosong, karena penghuninya sedang pergi," kata Abiyyun di lokasi kejadian.

Menurutnya, kebakaran pertama kali diketahui oleh anak penghuni rumah yang datang dan mendapati api sudah membesar. Ia kemudian meminta bantuan warga untuk menghubungi petugas pemadam kebakaran.

Menerima laporan sekitar pukul 15.00 WIB, Damkar Kota Bogor langsung mengerahkan empat unit mobil pemadam ke lokasi.

Abiyyun menjelaskan, proses pemadaman berlangsung sekitar 30 menit. Meski berada di kawasan permukiman padat dengan akses jalan sempit, petugas berhasil menjangkau titik kebakaran menggunakan selang pemadam.

"Lokasi di kawasan perumahan yang sempit, tapi akses bisa kita lalui pakai selang mencukupi untuk bisa sampai ke TKP 65. Alhamdulillah tidak merembet, kebakaran bisa kita tangani," ujarnya.

Sementara itu, Fitri (42), anak penghuni rumah, mengaku terkejut saat tiba di lokasi dan melihat api sudah membesar. Ia kemudian meminta pertolongan warga agar segera menghubungi petugas pemadam.

"Kaget banget pas ke sini sudah gede gitu apinya, langsung saya ke depan minta tolong ke warga teleponin pemadam," kata Fitri.

Fitri menduga api berasal dari bagian depan rumah. Ia menyebut kebakaran bermula ketika kompor dalam keadaan menyala, kemudian api menyambar hingga membesar.

Beruntung, kebakaran tidak merembet ke bangunan lain di sekitar lokasi. Penyebab pasti kebakaran masih perlu dipastikan lebih lanjut. **(den)**

199 SPPG di Depok Bakal Jalani Pemeriksaan Ketat

DEPOK (Poskota) – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan melakukan inspeksi dan evaluasi terhadap 199 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh dapur memenuhi standar kelayakan operasional serta makanan yang disajikan aman dan berkualitas.

Rencana tersebut dibahas dalam rapat terbatas Satuan Tugas (Satgas) Percepatan MBG di Ruang Wakil Wali Kota Depok, lantai 3 Balai Kota Depok, Senin (2/11).

Rapat tersebut menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian SPPG di Daerah.

Wakil Wali Kota Depok sekaligus Ketua Satgas Percepatan MBG, Chandra Rahmansyah, mengatakan pihaknya terlebih dahulu membahas mekanisme pelaksanaan sebelum turun melakukan pemeriksaan ke seluruh SPPG.

"Iya kami akan monitoring dan evaluasi seluruh SPPG di Kota Depok, sebelum itu dirapatkan dulu terkait mekanisme pelaksanaannya," ujar Chandra kepada berita.depok.go.id.

Ia menjelaskan, inspeksi akan melibatkan sejumlah perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan program MBG. Di antaranya dinas yang membidangi kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan, dan ketahanan pangan.

Selain itu, Inspektorat, camat, dan lurah juga akan dilibatkan dalam kegiatan pengawasan tersebut.

Pemeriksaan terhadap 199 titik SPPG itu nantinya dilakukan bersama unsur Badan Gizi Nasional (BGN). Penilaian mengacu pada 14 indikator kelayakan operasional SPPG.

Tidak hanya memeriksa kondisi fasilitas dan tata kelola dapur, tim juga akan mengevaluasi kualitas makanan serta menu yang disajikan. Pengawasan tersebut sekaligus bertujuan mengurangi potensi sisa makanan atau food waste.

Chandra menegaskan, pengawasan diperlukan agar pelaksanaan program MBG berjalan sesuai ketentuan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

"Kami ingin memastikan tata kelola SPPG bisa berjalan dengan baik. Harapannya juga terdistribusi MBG yang aman buat warga Depok, khususnya balita, ibu menyusui, dan ibu hamil," tandasnya.

Melalui inspeksi dan evaluasi secara menyeluruh, Pemkot Depok berharap kualitas pelayanan seluruh dapur MBG semakin terjaga, sehingga makanan yang didistribusikan memenuhi standar keamanan dan kebutuhan gizi penerima manfaat. **(den)**



Poskota/Diskominfo

Rapat terbatas Satgas Percepatan MBG Kota Depok di Ruang Wakil Wali Kota Depok lantai 3 Balai Kota Depok, Senin (02/11/26).



Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dua Jaksa KPK Bakal Ditugaskan di BGN

JAKARTA (Poskota) - Dua pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari unsur jaksa kembali bertugas di Kejaksaan Agung (Kejagung). Keduanya dikabarkan akan mendapat penugasan di Badan Gizi Nasional (BGN).

Dua pejabat tersebut adalah Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Mungki Hadipratikno, serta Kepala Sekretariat Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Haerudin.

Mungki membenarkan informasi mengenai penempatan di BGN tersebut. Ia mengatakan telah resmi tidak lagi bertugas di KPK sejak awal November 2026.

"Per 1 November saya sudah diberhentikan dengan hormat di KPK dan kembali ke Kejaksaan Agung," kata Mungki saat dihubungi, Selasa (3/11).

Meski demikian, Mungki menegaskan bahwa dirinya belum menjalani proses pelantikan di BGN.

"Untuk di BGN saya masih menunggu jadwal pelantikan," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto juga mengonfirmasi bahwa dua pejabat dari unsur jaksa tersebut telah kembali ke Kejagung.

Menurut Setyo, pengembalian penugasan keduanya tidak lepas dari masa kerja mereka di lembaga antirasuah yang sudah berlangsung cukup lama.

"Ya jadi dua itu adalah jaksa yang ditugaskan di KPK, mereka bekerja sudah lebih dari 10 tahun, sudah cukup lama, kemudian ya mungkin ada keinginan untuk refreshing lah kira-kira di tempat yang lain," kata Setyo saat ditemui di Gedung ACLC KPK, Selasa (3/11).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Mungki dan Haerudin akan mendapat penugasan di BGN. Namun, Setyo mengaku belum dapat memastikan informasi tersebut.

"Kalau nggak salah per 1 November ya, sudah kami lepas, ya selanjutnya kami hadapkan ke Kejaksaan sebagaimana prosedur yang berlaku karena dulu mereka kan dihadapkan ke penugasan ke KPK kan oleh Kejaksaan Agung," ujarnya. **(tog)**

Bareskrim Bongkar Kasus TPPO Tentara Bayaran Rusia

❍ Korban Warga Sipil hingga Eks TNI-Polri

JAKARTA (Poskota) - Bareskrim Polri mengungkap kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk menjadi tentara bayaran Rusia. Para korban berasal dari berbagai kalangan, mulai dari warga sipil hingga mantan anggota TNI dan Polri.

Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Azizah, mengungkapkan bahwa pengusutan kasus tersebut berawal dari lima laporan polisi yang ditangani Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri maupun Direktorat Reserse PPA-PPO di sejumlah wilayah.

Dari laporan pertama, yakni LP/A/8/IX/2026/SPKT/Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri tertanggal 21 Oktober 2026, polisi telah menetapkan satu orang tersangka.

Sementara itu, dalam laporan kedua dengan nomor LP/A/10/X/2026/SPKT/Satres PPA-PPO Polres Metro Jakarta Barat tertanggal 23 Oktober 2026, polisi menetapkan lima orang tersangka yang terdiri atas dua warga negara Rusia dan tiga WNI. Jumlah korban dalam perkara tersebut mencapai 12 orang.

"Yaitu, dua warga negara Rusia dan tiga warga negara Indonesia, dan jumlah korban ada 12 orang," ujar Nurul, Selasa (3/11).

Selanjutnya, dalam laporan ketiga bernomor LP/B/8198/IX/2026/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 28 Oktober 2026, polisi menetapkan dua tersangka, masing-masing seorang WNI dan seorang warga negara Ukraina. Jumlah korban dalam perkara ini sebanyak 12 orang.

Pada laporan keempat, yakni LP/A/6/IX/2026/SPKT/Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri tertanggal 25 September 2026, polisi juga telah menetapkan dua orang tersangka dengan jumlah korban tujuh orang.



Direktur PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah (kanan depan) memberikan keterangan pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (2/11/2026).

Poskotafatimewa

Adapun laporan kelima dengan nomor LP/A/5/IX/2026/SPKT/Satres PPA-PPO Polres Bogor tertanggal 20 Oktober 2026, polisi menetapkan dua orang tersangka dan satu orang lainnya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

"(Di LP Polres Bogor) jumlah korban sebanyak 22 orang," ujar Nurul.

Nurul menjelaskan, para pelaku merekrut korban tanpa memandang latar belakang pekerjaan. Selain masyarakat sipil, mantan personel TNI dan Polri juga menjadi sasaran perekrutan.

"Untuk yang direkrut itu tidak hanya warga sipil, tapi juga ada eks TNI dan eks Polri," tuturnya.

Sementara, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan pemerintah tengah melakukan penelusuran untuk memastikan informasi mengenai keterlibatan WNI dalam dinas militer Rusia.

"Seluruh proses dilakukan dengan mengedepankan prinsip pelindungan data pribadi, dan seluruh pihak diimbau agar tidak berspekulasi terkait persoalan tersebut," kata Yvonne, Selasa (3/11).

Yvonne menjelaskan, pemerintah Indonesia telah menyampaikan permintaan resmi melalui jalur diplomatik kepada Pemerintah Rusia agar mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah perekrutan WNI ke dalam militer maupun formasi lain yang berkaitan dengan militer Rusia melalui jalur apa pun.

"Pemerintah RI telah menyampaikan permintaan resmi melalui jalur diplomatik kepada Pemerintah Rusia agar mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan WNI tidak direkrut ke dalam militer maupun formasi lainnya terkait militer di Rusia melalui jalur apa pun, termasuk praktik yang terindikasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO)," ujarnya.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga meminta agar WNI dimasukkan ke dalam daftar negara yang warga negaranya dikecualikan dari perekrutan militer Rusia melalui jalur apa pun. Kemlu turut meminta agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif dan segera.

Yvonne juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima tawaran pekerjaan di luar negeri, terutama yang berpotensi berkaitan dengan perekrutan untuk kepentingan militer.

"Pemerintah RI mengimbau masyarakat agar senantiasa memverifikasi keabsahan tawaran pekerjaan di luar negeri melalui instansi berwenang, mewaspadai tawaran pekerjaan dengan imbalan tidak wajar, tak menandatangani kontrak yang tidak dipahami, serta memperhatikan risiko keselamatan dan konsekuensi hukum keterlibatan dalam dinas militer asing," pungkasnya. **(tog)**



Poskotafatimewa

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengklaim penyidik akan memanggil Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam waktu dekat.

Ketua KPK Minta Pemeriksaan Nusron Wahid Dipercepat

❍ Kasus Korupsi ATR/BPN

JAKARTA (Poskota) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menanggapi pemanggilan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN. Setyo mengaku belum menerima laporan mengenai adanya kendala dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut.

"Tentu pemeriksaan itu kan dilakukan disesuaikan juga dengan penyidiknya, mungkin sedang ada kegiatan di luar kota," kata Setyo saat ditemui di Gedung ACC KPK, Selasa (3/11).

Meski demikian, Setyo belum menyampaikan kapan pemeriksaan terhadap Nusron akan dijadwalkan kembali. Ia mengimbau publik untuk bersabar menunggu jadwal resmi dari tim penyidik.

"Kalau waktunya tentu harapan saya makin cepat makin bagus," ujarnya.

Diketahui, Nusron telah dua kali tidak memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Pemanggilan pertama dijadwalkan pada Rabu (7/10/2026). Saat itu, Nusron berhalangan hadir karena memiliki agenda internal di kementerian yang dipimpinnya.

Pemeriksaan kemudian dijadwalkan ulang pada Kamis (15/10). Namun, Nusron kembali tidak memenuhi panggilan tersebut dengan alasan sedang melakukan perjalanan dinas ke Malaysia. **(tog)**

BRIN Uji Coba Inovasi Dumakron untuk Atasi Karhutla di Kalimantan

JAKARTA (Poskota) - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menguji coba inovasi Dumakron dalam operasi modifikasi cuaca (OMC) di Kalimantan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya BRIN untuk turut menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Tanggal 5 (November) nanti, besok di Kalimantan, kita akan coba gunakan Dumakron ya, 2 milimikron dengan menggunakan drone," kata Arif di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/11).

Ia berharap inovasi Dumakron yang menggunakan partikel berukuran mikro tersebut dapat efektif memicu hujan buatan di wilayah Kalimantan.

Selain melakukan rekayasa cuaca melalui udara, BRIN juga tengah menguji metode inovatif untuk memadamkan kebakaran di bawah permukaan tanah.

Arif mengungkapkan, pihaknya sedang meneliti efektivitas pemanfaatan bahan berbasis singkong dan APP untuk memadamkan titik api yang berada di dalam tanah.

"Serta ini, uji coba pemanfaatan singkong dan APP ya, untuk bisa memadamkan api yang ada di dalam tanah. Itu yang sekarang sedang dilakukan," ujarnya. **(tog)**

KPK Periksa Anak Eks Kakanwil Pajak Jakarta Khusus di Hongkong

JAKARTA (Poskota) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa seorang saksi di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Hongkong pada Selasa (3/11). Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Saksi yang diperiksa adalah Feby Paramita (FEB), seorang wiraswasta yang juga merupakan anak dari mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJP Jakarta Khusus, Muhammad Haniv (MH). Haniv telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

"Pemeriksaan lainnya dilakukan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hongkong atas nama FEB," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Selain di Hongkong, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi di Gedung Merah Putih KPK. Keduanya adalah Sugianto Halim selaku Direktur PT Prima Konsultan Indonesia dan Habib Setiawan dari pihak swasta.

Belum diketahui materi yang akan didalami penyidik dari keterangan para saksi tersebut, termasuk alasan pemeriksaan Feby dilakukan di Hongkong.

Sebelumnya, Feby dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Senin (28/9/2026). Namun, saat itu ia tidak dapat memenuhi panggilan karena sedang berada di luar negeri.

"Saksi saudari FEB menyampaikan konfirmasi kepada penyidik belum bisa hadir dalam pemeriksaan hari ini karena sedang berada di luar negeri," kata Budi, sebagaimana dikutip pada Selasa (29/9).

Sebelumnya, KPK mengungkapkan bahwa Muhammad Haniv diduga memanfaatkan pengaruh dan koneksinya untuk kepentingan pribadi serta usaha anaknya.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menuturkan bahwa salah satu dugaan gratifikasi terjadi pada 2016. Saat itu, Haniv disebut mengirimkan surat elektronik kepada bawahannya untuk meminta dicarikan sponsor bagi acara fashion show yang diikuti anaknya berinisial FP.

"Di mana permintaan itu ditujukan kepada beberapa perusahaan di Jakarta ataupun di luar Jakarta, yang merupakan Wajib Pajak (WP)," ucap Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (19/8).

Sejumlah perusahaan kemudian diduga memberikan uang sponsorship yang langsung dikirimkan ke rekening anak Haniv. Total uang yang diterima dari perusahaan wajib pajak di Jakarta mencapai sekitar Rp400 juta, sedangkan dari perusahaan di luar Jakarta sekitar Rp300 juta.

"Bahwa total uang yang diterima dari beberapa perusahaan WP Jakarta lebih kurang mencapai Rp400 juta dan perusahaan di luar WP Jakarta lebih kurang sebesar Rp300 juta," tuturnya.

Selain itu, Haniv diduga menerima gratifikasi dari sejumlah pihak dalam bentuk valuta asing melalui perantara berinisial BSA selama periode 2014-2022. Uang tersebut kemudian diduga ditempatkan dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar Rp10 miliar.

Pada periode 2013-2018, Haniv juga diduga menerima gratifikasi berupa valuta asing dari sejumlah pihak terkait perusahaan. Uang tersebut kemudian ditukarkan melalui beberapa penukaran valuta asing (money changer) dengan total nilai sekitar Rp10 miliar.

KPK menyebut total penerimaan gratifikasi yang diduga diterima Haniv dari sejumlah perusahaan mencapai lebih dari Rp20,7 miliar. **(tog)**

Polisi Dalami Aduan soal Ijazah SMA Gibran

❍ Putusan MK dan MA Jadi Referensi

JAKARTA (Poskota) - Bareskrim Polri masih mendalami pengaduan masyarakat terkait polemik surat keterangan (suket) pendidikan atau ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam penanganan aduan tersebut, penyidik turut mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

Aduan itu sebelumnya disampaikan Tim Advokasi Penegak Etika Moral dan Integritas Bangsa terkait dokumen suket nomor 9149/DDII/KS/2019. Dokumen yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut digunakan Gibran untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024.

"Laporan yang diterima oleh Bareskrim, tentunya akan dilaksanakan tahapan-tahapan bagian daripada pemrosesan satu laporan, ya secara prosedural pasti," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Johnny Eddizon Isir, Selasa (3/11).

Menurut Johnny, putusan MK dan MA akan menjadi bahan referensi bagi penyidik dalam menangani aduan tersebut. Pertimbangan itu nantinya akan dipadukan dengan keterangan para ahli untuk memperkuat alat bukti dalam proses penyelidikan yang masih berlangsung.

"Karena satu peristiwa dugaan pidana tentunya perumusan untuk kaitan sama pemenuhan alat bukti, argumentasi-argumentasi yuridisnya juga harus kemudian kita telaah satu per satu," ujarnya.

Johnny menambahkan, penyidik Bareskrim juga akan meminta keterangan ahli, baik ahli hukum pidana maupun ahli lainnya, guna memperkuat proses pembuktian.

"Tentunya kawan-kawan dari Bareskrim pasti akan juga melakukan pemeriksaan ahli, apakah ahli hukum pidana ya, atau ahli-ahli yang lain untuk memperkuat tadi dari sisi pembuktian. Mari kita tunggu, kita kawal prosesnya. Kita percayakan bahwa penyidik akan bekerja secara profesional, prosedural, proporsional, dan etik," tambahnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menerima laporan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait dugaan persoalan keabsahan dokumen pendidikan atau ijazah yang digunakan dalam proses pencalonannya pada Pemilu 2024. Laporan tersebut kemudian ditangani sebagai pengaduan masyarakat (dumas).

Kuasa hukum pelapor, Ahmad Khozinudin, mengungkapkan bahwa pelapor dan penyidik sempat saling menyampaikan pandangan mengenai laporan tersebut.

"Dan kepolisian tadi memberikan perspektif bahwa Dumas itu juga tidak berbeda dengan LP," kata Ahmad di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (7/10). **(tog)**

Ekonomika Pancasila
Prof. Yudhie Haryono, Ph.D

KONSTITUSINOMIC

Apa yang dapat kita kembangkan dari diskursus Nusantaranomic yang minggu lalu kutawarkan? Di Sekolah Tebet (Tebet Schools) kami menawarkan "ekonomi konstitusi." Cara bekerjanya dengan "konfigurasi sistem." Satu ilmu yang hibrida karena berasal dari berbagai pengetahuan mendalam yang tugas utamanya adalah membela kaum miskin, kaum difabel, kaum kalah, kaum bodoh, serta mereka yang menyerah dan dijajah.

Kesadaran ini berangkat dari kesadaran kritis dengan metoda critical theory untuk menyudahi rezim pemikiran neoliberalis yang jahat, serakah, tumpul dan menjajah.

Ini adalah pendekatan ekonomi yang dijalankan berdasarkan prinsip, aturan, dan amanat yang tercantum dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam bernegara.

Hilirnya tentu saja adalah membebaskan negara dan warganya dari ketertindasan, kebodohan, kemiskinan, ketimpangan dan kehinaan guna menegakkan negara pancasila sebagai rumah harkat martabat bangsa. Inilah ilmu ekonomi yang mempersatukan, mendaulatkan, mengadilkan, memakmurkan, serta menyentosakan semua.

Pertanyaan pentingnya adalah, "mengapa iptek (ekonomi) yang lahir dari Barat disebut "teori," sementara pengetahuan dari Asia kerap hanya disebut "pengetahuan non ilmiah"? Tentu, jawaban mudahnya, itu karena kolonialisme teritori telah berakhir secara politik, tetapi jejaknya masih bertahan dalam teori, kurikulum, bahasa akademik, dan hierarki pengetahuan. Akibatnya, tradisi Nusantara dan kultur Indonesianisme lebih sering dijadikan objek penelitian daripada diakui sebagai sumber teori dan epistemologi.

Karenanya, pendekatan ini akan mematahkan mitos itu semua. Inilah mata ajar dekolonialisasi. Mata ajar menuju nusantara studies. Mata ajar yang kokoh, kuat, komprehensif dan konsisten. Mata ajar bermental "to be nobel prize." Pada diskursus di dalamnya akan terasa kebaruan dan kejeniusannya. Tidak percaya? Teruslah membaca dan mencermatinya.

Inilah mata ajar yang menarasikan sistem dan kebijakan publik dalam perekonomian yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai, prinsip, dan aturan yang tertuang dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi negara kita. Sistem ini menegaskan bahwa pemilik sah kekayaan Indonesia adalah warga negara, sehingga semua kebijakannya harus berpihak kepada kepentingan mereka, bukan sekadar kepentingan pemodal, pengusaha, konglomerat dan oligark.

Repotnya, selama ini kita terlalu menyerahkan jiwa raga, pikiran serta nalar ke dunia luar: ekonomi pasar bebas yang super culas dan neoliberal. Ekonomi yang bekerja dalam ketimpangan informasi dan dikuasai segelintir kaum kaya serakah. Padahal peta jalan ekopol itu ada di negeri kita sendiri. Karena malas, invasi dan inlander, peta jalan itu dilupakan.

Memang, moyang kita tidak menulis dalam bentuk buku. Mereka menulis di atas gunung, di langit-langit, di dalam air, angin dan api. Mereka mewariskan kitab semesta. Itu pusaka yang telah ribuan tahun membuat kita hadir di republik ini. Kini, mata ajar semesta itu kami tulis ulang. Dan, bukunya telah siap menemani kita semua dalam perlawanan kewarasan.

Dus, teorama ini bukan sekadar soal proklamasi, ruang, ekspresi dan ekspansi. Melainkan tentang sejarah kelahiran bangsa, kebudayaan yang membentuk tanah air-udara, cita-cita kolektif, ideologi yang disepaksati (filsafat), kurikulum yang diajarkan serta tradisi-tradisi besar menuju peradaban terbaik.

Karenanya, semua penganutnya akan memahami bahwa, bangsanya berdiri di atas kesadaran sejarah, budaya, ruang, dan cita-cita yang jelas: senasib seperjuangan; kemiskinan dan perlawanan; kehinaan dan revolusi. Para ekonom yang menulis ulang mata ajar itu merasa mendapat amanah untuk mempertahankan kedaulatan agar ditegakkan setegak-tegaknya; memaydari utuh dan mendalam tentang martabat bangsa (the dignity of nation); memahami setiap detik usaha penjajahan yang terus menerjang.

Para ekonom ini bekerja jenius untuk menikam mati keserakahan, ketidakjujuran, tradisi manipulasi, dan penyembahan iptek materialisme. Mereka meringkas hidupnya menjadi: lahir, jihad, syahid. Mereka fokus dan ikhlas, sebab yang dituju bukan hanya kalah menang, tetapi juga salah benar. Mereka yakin, kebenaran pasti datang dan tegak di bumi ini. Kemenangan hanya soal waktu dan jatah zaman. (*)

Menkeu Waspadai Kenaikan Harga Pangan akibat Kekeringan

❍ Pemerintah Perkuat Koordinasi

JAKARTA (Poskota) - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mewaspadai potensi kenaikan harga pangan atau volatile food di tengah kondisi kekeringan yang berisiko mengganggu produksi. Pemerintah pun terus memperkuat koordinasi untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan sekaligus mengendalikan tekanan inflasi.

Suahasil mengatakan, inflasi saat ini berada di level 3,2 persen dan masih dalam rentang sasaran Bank Indonesia (BI). Menurutnya, komponen inflasi inti dan harga yang diatur pemerintah (administered prices) masih terkendali.

"Yang perlu kita waspadai adalah volatile food karena sedang dalam kekeringan. Jadi memang harus kita waspadai terus ke depannya, seperti apa produksi barang-barang kita," ujar Suahasil di Mahkamah Agung, Selasa (3/11).

Dia menjelaskan, pemerintah terus meningkatkan koordinasi untuk memastikan ketersediaan pangan. Selain itu, perkembangan produksi dan harga berbagai komoditas pangan juga terus dipantau agar tekanan inflasi tetap terkendali.

"Pangan kita yang harganya itu memang mesti kita perhatikan terus-menerus," katanya.

Sementara itu, terkait potensi dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi pada semester II 2026, Suahasil belum memberikan kesimpulan. Dia mengatakan, pemerintah akan terlebih dahulu mencermati data pertumbuhan ekonomi yang dijadwalkan diumumkan pada pekan ini.

"Nanti kita lihat pertumbuhan ekonomi kan minggu ini diumumkan, ya. Kita lihat angkanya," pungkasnya.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) juga mewaspadai risiko kenaikan inflasi pangan akibat fenomena El Nino yang diperkirakan berlanjut hingga awal 2027. BI memprioritaskan pengamanan pasokan beras, cabai, dan bawang merah, terutama di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), Bali dan Nusa Tenggara (Bali Nusra), serta Sumatra.

Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali mengatakan, inflasi indeks harga konsumen (IHK) pada September 2026 tercatat sebesar 3,28 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sementara itu, inflasi pangan bergejolak (volatile food) meningkat menjadi 5,03 persen.

"Memang El Nino ini berpengaruh karena sekarang terlihat berkepanjangan dan diperkirakan akan lebih dari tahun 2026, akan awal 2027," ujar Ricky dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta, Rabu (21/10).

Ricky menyebutkan, tekanan inflasi pangan tertinggi terjadi di wilayah Sulampua sebesar 8,63 persen, disusul Kalimantan sebesar 7,62 persen.

Di wilayah Sulampua, kenaikan harga terutama dipicu oleh cabai rawit, cabai merah, tomat, bawang merah, beras, serta ikan cakalang dan tongkol. Adapun di Kalimantan, tekanan harga berasal dari beras, cabai, telur ayam ras, dan sejumlah komoditas ikan.

Menurut Ricky, fenomena El Nino berkepanjangan paling berisiko mengganggu produksi dan pasokan beras, cabai, serta bawang merah. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, BI mendorong penguatan kerja sama antardaerah, fasilitasi distribusi pangan, operasi pasar, serta gerakan pasar murah.

Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat penyaluran pasokan dari daerah surplus ke wilayah yang mengalami defisit pangan.

"Fokus Bank Indonesia di daerah adalah menjaga suplai dari komoditas utama tersebut," kata Ricky. **(tog)**

Pemerintah Akan Bangun Tempat Penyimpanan Minyak di Sumatera

JAKARTA (Poskota) - Pemerintah berencana membangun sejumlah fasilitas penyimpanan minyak mentah (crude oil storage) di wilayah Sumatera. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memastikan ketersediaan kapasitas penyimpanan yang memadai bagi pasokan minyak mentah impor.

Rencana tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, seusai menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/11).



Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia (kanan).

Bahlil mengatakan, fasilitas penyimpanan baru tersebut ditargetkan mampu menampung cadangan minyak untuk kebutuhan lebih dari 20 hari, dengan target kapasitas penyimpanan yang dapat mencukupi hingga 60 hari.

"Kita akan membangun storage beberapa di wilayah Sumatra untuk ketika kita melakukan import crude, itu semuanya bisa ada tempatnya di atas 20 hari. Target kita bisa sampai dengan 60 hari," kata Bahlil.

Terkait tahapan pengerjaan proyek, Bahlil menjelaskan bahwa studi kelayakan teknis atau Engineering Feasibility Study (EFS) telah rampung. Pemerintah dijadwalkan mulai melakukan peninjauan langsung ke lapangan pada akhir tahun ini untuk mengkaji kelayakan lokasi pembangunan secara lebih mendalam.

Peninjauan tersebut akan difokuskan pada aspek keselamatan operasional, mitigasi bencana, serta keamanan di sekitar lokasi. Menurut Bahlil, pemilihan lokasi penyimpanan minyak mentah harus dilakukan secara cermat karena berkaitan dengan risiko keselamatan yang tinggi.

"Di akhir tahun ini akan memulai untuk kita mengecek lokasinya dari sisi keamanan, baik dalam konteks gempanya maupun keamanan lokalnya," ujarnya.

Dia menegaskan, pemerintah juga akan mempertimbangkan potensi bencana di lokasi yang diusulkan agar keberadaan fasilitas penyimpanan tidak menimbulkan risiko keselamatan bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar.

"Salah satu di antaranya adalah kita rancang jangan sampai kondisi di mana kita meletakkan storage itu punya peluang atau potensi besar untuk jadi bencana. Itu kan menyangkut keselamatan," tuturnya. **(tog)**

Amran Sebut Penghentian Ekspor Sawit Bisa Berdampak Besar bagi Negara Lain

JAKARTA (Poskota) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut penghentian ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dari Indonesia berpotensi menimbulkan dampak besar bagi negara-negara lain. Hal ini lantaran Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia yang memasok kebutuhan sejumlah negara, seperti India, China, Pakistan, hingga Amerika Serikat.

Menurut Amran, komoditas sawit memiliki daya tawar strategis dalam perdagangan internasional. Bahkan, ia menilai penghentian pasokan sawit Indonesia dapat meniimbulkan dampak yang lebih besar dibandingkan efek bom atom maupun senjata nuklir.

"Contoh bahwa ini bisa mengubah dunia. Ini jauh lebih dahsyat bom atom. Ini jauh lebih dahsyat daripada nuklir. Ini bisa mengubah peta dunia. Sawit ini kita produsen terbesar dunia. Ekspor kita ke India, China, Pakistan, Amerika, dan sebagainya," ujar Amran, dikutip dari keterangan resminya, Selasa (3/11).

Amran menggambarkan besarnya ketergantungan sejumlah negara terhadap pasokan sawit Indonesia. Menurutnya, apabila ekspor dihentikan dan seluruh produksi dialihkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, negara-negara tujuan ekspor akan merasakan dampak signifikan.

"Pertanyaan saya, kalau ini dihentikan, lalu dijadikan biosolar di dalam negeri, kiamat tidak negara lain? Kiamat ya, kalah enggak nuklir, bom atom? Kalah. Indonesia nanti tidak bergantung untuk pangan dan energi," lanjutnya.

Ia menilai, optimalisasi pemanfaatan sawit sebagai bahan baku energi domestik dapat memperkuat kemandirian Indonesia. Dengan mengolah komoditas tersebut menjadi biosolar, Indonesia berpeluang mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri.

Di sisi lain, pemerintah juga mencatat perkembangan positif dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. Saat ini, Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan dari 11 komoditas pangan pokok strategis.

Delapan komoditas tersebut meliputi beras, jagung pakan, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, daging ayam ras, telur ayam ras, dan gula konsumsi.

Sementara itu, Indonesia masih membutuhkan pasokan dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan tiga komoditas lainnya, yakni kedelai, bawang putih, dan daging ruminansia.

Meski masih bergantung pada impor, porsi pemenuhan kebutuhan ketiga komoditas tersebut melalui pasokan luar negeri tercatat tidak lebih dari 5 persen dari total kebutuhan konsumsi pangan nasional.

Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), total kebutuhan konsumsi untuk 11 komoditas pangan pokok strategis tersebut diperkirakan mencapai sekitar 68,8 juta ton. **(tog)**

Mendag Waspadai Harga Kedelai dan Minyak Goreng

❍ Imbas Kenaikan Dolar AS

JAKARTA (Poskota) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengakui penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) berpotensi memicu kenaikan harga sejumlah komoditas impor, seperti kedelai dan minyak goreng. Untuk mengantisipasi dampaknya, pemerintah berupaya memperkuat distribusi dan memastikan pemerataan pasokan ke seluruh daerah.

"Ya, pasti kalau dolar pasti beberapa itu berpengaruh," ujar Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (3/11).

Budi menjelaskan, fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan kelancaran distribusi barang agar kebutuhan pangan di setiap wilayah terpenuhi. Upaya tersebut dilakukan untuk menghindari ketimpangan pasokan yang berpotensi memicu kenaikan harga di daerah tertentu.

"Kita ingin meneruskan terutama dari sisi distribusinya. Jadi, biar pemerataan masing-masing daerah yang dibutuhkan itu bisa," jelasnya.

Di luar pengaruh penguatan dolar AS, Budi menilai harga sebagian besar bahan pokok di pasaran masih relatif stabil. Meski demikian, dia memberikan perhatian khusus terhadap komoditas cabai yang sempat mengalami lonjakan harga akibat penurunan hasil panen yang dipengaruhi faktor cuaca.

Sebagai langkah penanganan, pemerintah telah memasok 7 ton cabai dari Jawa Timur ke Halmahera untuk memenuhi kekurangan pasokan di wilayah tersebut.

Upaya pemerataan distribusi juga dilakukan terhadap komoditas telur ayam. Pemerintah merelokasi pasokan dari daerah yang mengalami surplus ke wilayah yang mencatatkan harga lebih tinggi.

Budi mencatat, harga rata-rata nasional telur ayam saat ini berada di kisaran Rp26.400 per kilogram. Angka tersebut masih berada di bawah harga acuan penjualan (HAP) yang ditetapkan sebesar Rp30.000 per kilogram.

Pemerintah optimistis penguatan distribusi dan pemerataan pasokan dapat membantu menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen sekaligus melindungi keberlangsungan usaha para peternak. **(tog)**

Ekonomi RI Diproyeksi Tumbuh 5,2 Persen Sepanjang 2026

JAKARTA (Poskota) - Chief Economist & Head OCBC Group Research, Selena Ling, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai 5,2 persen sepanjang 2026. Konsumsi rumah tangga dan investasi diperkirakan tetap menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian perdagangan dan kondisi keuangan global.

Menurut Selena, Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kuat berkat permintaan domestik yang solid. Selain itu, percepatan pengembangan sektor industri dan infrastruktur digital turut membuka peluang ekspansi ekonomi dalam jangka panjang.

"Indonesia tetap memiliki fondasi pertumbuhan yang ditopang konsumsi rumah tangga dan investasi. Kami memproyeksikan pertumbuhan sebesar 5,2 persen pada tahun 2026," ujar Selena dalam acara media gathering OCBC Outlook di Jakarta, Selasa (3/11).

Sebagai gambaran, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada kuartal II 2026 tumbuh 5,3 persen secara tahunan (year-on-year/YoY). Pada periode tersebut, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,1 persen YoY, sedangkan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi sebesar 6,9 persen YoY.

Di tingkat regional ASEAN, sejumlah negara juga mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif. Pada kuartal III 2026, Vietnam mencatatkan pertumbuhan sebesar 9,95 persen YoY, Singapura 5,4 persen YoY, dan Malaysia 5,3 persen YoY.

Meski demikian, Selena mengingatkan investor agar tetap mencermati sejumlah risiko eksternal. Beberapa di antaranya adalah tren inflasi di Amerika Serikat (AS), arah kebijakan suku bunga acuan bank sentral AS atau The Federal Reserve (The Fed), serta ketegangan geopolitik global.

Berbagai faktor tersebut berpotensi memengaruhi arus modal, nilai tukar, hingga biaya pendanaan.

Dari sisi domestik, ketahanan sektor keuangan Indonesia dinilai masih cukup kuat. Industri perbankan nasional tercatat memiliki rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) sebesar 24,1 persen. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) bruto terjaga di level 2,1 persen per Agustus 2026.

Selain itu, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2026 mencapai USD146,3 miliar atau setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor. Adapun tingkat inflasi domestik pada September 2026 tercatat sebesar 3,3 persen YoY.

Peluang ekspansi ekonomi juga didukung oleh program hilirisasi industri. Nilai realisasi investasi hilirisasi tercatat menembus Rp480 triliun sepanjang sembilan bulan pertama 2026.

Aktivitas tersebut turut meningkatkan kebutuhan terhadap berbagai sarana pendukung industri, mulai dari infrastruktur logistik, transportasi, hingga pasokan energi.

Di samping itu, investasi pada infrastruktur digital, seperti komputasi awan (cloud computing), pusat data (data center), dan ekosistem kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), juga menjadi salah satu pilar pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kawasan ASEAN.

Sementara itu, Wealth Management Advisory Head OCBC Indonesia, Diamond Stole, mengatakan potensi pertumbuhan ekonomi nasional dan regional membuka peluang jangka panjang bagi nasabah dalam mengelola serta mengembangkan kekayaan.

"Dengan pendampingan yang personal, kami membantu nasabah menjaga arah untuk menuju tujuan finansial mereka," kata Diamond.

Sejalan dengan optimisme tersebut, total aset kelolaan (Asset Under Management/AUM) layanan wealth management OCBC tercatat mencapai Rp374 triliun per Juni 2026. Angka tersebut tumbuh 13 persen secara tahunan.

Penguatan bisnis wealth management OCBC dilakukan melalui integrasi layanan digital, termasuk fitur Wealth Discovery dan For Your Investment (FYI) dalam aplikasi OCBC Mobile. Layanan tersebut juga didukung pendampingan personal bagi nasabah dari berbagai segmen, mulai dari Nyala, Premier, hingga Private Banking. **(tog)**

Empat Pilar Timnas Indonesia Dibekap Cedera Jelang FIFA Matchday

Peluang Dipanggil Menipis

JAKARTA (Poskota) - Kabar kurang menggembirakan datang dari sejumlah pemain langganan Timnas Indonesia menjelang FIFA Matchday November 2026. Sedikitnya empat pemain yang selama ini menjadi bagian penting skuad Garuda masih berkutat dengan cedera sehingga terancam absen dari pemanggilan tim nasional.

Keempat pemain tersebut adalah Ole Romeny, Miliano Jonathans, Marselino Ferdinan, dan Asnawi Mangkualam Bahar. Hingga saat ini, mereka masih menjalani proses pemulihan dan belum sepenuhnya kembali ke kondisi terbaik.

Ole Romeny menjadi salah satu pemain yang diragukan bisa memperkuat Timnas Indonesia. Penyerang tersebut mengalami cedera pergelangan kaki atau engkel saat membela Fortuna Sittard di kompetisi Liga Belanda.

Cedera tersebut membuat peluang Romeny masuk daftar panggilan pelatih Timnas Indonesia untuk agenda November semakin menipis. Tim pelatih tentu harus mempertimbangkan kondisi fisik pemain agar tidak mengambil risiko yang dapat memperparah cedera.

Nasib serupa dialami Miliano Jonathans. Pemain FC Utrecht itu masih menjalani pemulihan akibat cedera quadriceps atau otot paha depan kaki kiri yang dialaminya sejak September 2025.

Lamanya proses pemulihan membuat Jonathans kemungkinan belum bisa kembali memperkuat skuad Garuda dalam waktu dekat. Kondisinya masih menjadi tanda tanya menjelang pengumuman daftar pemain.

Sementara itu, Marselino Ferdinan juga belum sepenuhnya pulih. Pemain yang terikat kontrak dengan Persija Jakarta tersebut saat ini berada di Eropa untuk menjalani program pemulihan cedera.

Meski sudah kembali menginjak lapangan dan menjalani aktivitas sepak bola, kondisi Marselino belum mencapai kebugaran optimal. Ia masih membutuhkan waktu untuk mengembalikan performa dan kesiapan bertanding.

Asnawi Mangkualam Bahar juga belum bisa dipastikan memperkuat Timnas Indonesia. Bek kanan yang memperkuat Port FC tersebut masih menjalani pemulihan cedera anterior cruciate ligament (ACL) yang disertai robekan pada meniskus lutut.

Kondisi Asnawi menjadi perhatian tersendiri karena cedera tersebut membutuhkan penanganan dan rehabilitasi secara bertahap. Meski baru saja melangsungkan pernikahan pada akhir pekan lalu, ia masih harus fokus menjalani proses pemulihan agar bisa kembali merumput.

Di tengah kabar cedera tersebut, Timnas Indonesia mendapat angin segar dari dua pemain bertahan yang mulai kembali merumput.

Kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes, dipastikan telah pulih dari cedera. Bek tengah tersebut bahkan sudah kembali tampil bersama Sassuolo dalam pertandingan menghadapi Fiorentina.

Kembalinya Idzes menjadi kabar positif bagi lini pertahanan skuad Garuda. Pengalaman dan kepemimpinannya di jantung pertahanan diharapkan bisa kembali memberikan kontribusi bagi tim nasional.

Selain Idzes, Mees Hilgers juga telah kembali bermain. Pemain yang kini memperkuat Heerenveen tersebut sudah mendapatkan kesempatan tampil, meskipun menit bermainnya masih terbatas.

Dengan kondisi sejumlah pemain yang belum sepenuhnya fit, tim pelatih Timnas Indonesia harus mempertimbangkan komposisi skuad secara cermat. Kebugaran pemain menjadi faktor penting agar persiapan menghadapi FIFA Matchday November 2026 berjalan maksimal. **(ruh)**

Messi dan Ronaldo Bersaing Rebut FIFPRO World 11 2026

LONDON (Poskota) - Dua megabintang sepak bola dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, kembali mendapat pengakuan di panggung internasional. Keduanya masuk dalam daftar 26 nominator FIFPRO Men's World 11 2026 yang akan bersaing memperebutkan tempat dalam susunan 11 pemain terbaik dunia.

Federasi Internasional Pesepakbola Profesional (FIFPRO) mengumumkan daftar nominasi tersebut melalui laman resminya, Senin (2/11) malam WIB. Masuknya nama Messi dan Ronaldo menjadi perhatian, mengingat keduanya telah lama menjadi ikon sepak bola dunia dan masih mampu bersaing dengan deretan pemain terbaik generasi baru.

Penentuan FIFPRO World 11 tahun ini melibatkan 19.806 pesepak bola profesional dari 73 negara. Mereka akan memberikan suara untuk memilih pemain yang dinilai tampil paling menonjol sepanjang periode penilaian.

Berbeda dengan penghargaan sepak bola lainnya, FIFPRO World 11 sepenuhnya ditentukan melalui pemungutan suara para pemain profesional. Dengan demikian, penilaian datang langsung dari sesama pesepak bola yang memahami kualitas dan kontribusi pemain di lapangan.

Sebanyak 26 pemain yang masuk nominasi merupakan mereka yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan penampilan sepanjang satu musim, mulai 4 Agustus 2025 hingga 19 Juli 2026.

FIFPRO menetapkan persyaratan minimal 30 pertandingan resmi selama periode penilaian. Artinya, penampilan impresif seorang pemain belum cukup untuk masuk nominasi apabila tidak memenuhi batas minimal jumlah pertandingan tersebut.

Selain Messi dan Ronaldo, daftar nominasi juga dihuni sejumlah bintang sepak bola dunia. Di antaranya Harry Kane, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Jude Bellingham, Lamine Yamal, Pedri, dan Pau Cubarsi.

Persaingan dipastikan berlangsung ketat karena para nominator berasal dari berbagai klub dan kompetisi elite dunia. Mereka harus mendapatkan dukungan suara dari sesama pemain profesional untuk mengamankan tempat dalam tim terbaik.

Susunan FIFPRO Men's World 11 2026 nantinya terdiri atas satu penjaga gawang, tiga pemain bertahan, tiga gelandang, dan tiga penyerang dengan perolehan suara tertinggi di masing-masing posisi.

Satu tempat tersisa akan diberikan kepada pemain yang memperoleh suara tertinggi berikutnya, tanpa mempertimbangkan posisi bermainnya.

FIFPRO dijadwalkan mengumumkan susunan lengkap 11 pemain terbaik dunia tersebut pada Senin (9/11). Pengumuman itu sekaligus menjadi penantian bagi Messi dan Ronaldo untuk kembali membuktikan eksistensinya di tengah persaingan dengan generasi baru sepak bola dunia. **(ruh)**



Daftar 26 nominasi FIFPRO Men's World 11 2026

PENJAGA GAWANG
1. Thibaut Courtois (Belgia/Real Madrid)
2. Emiliano Martinez (Argentina/Aston Villa dan Chelsea)
3. David Raya (Spanyol/Arsenal)

BELAKANG
1. Pau Cubarsi (Spanyol/Barcelona)
2. Marc Cucurella (Spanyol/Chelsea dan Real Madrid)
3. Virgil van Dijk (Belanda/Liverpool)
4. Gabriel (Brasil/Arsenal)
5. Achraf Hakimi (Maroko/Paris Saint-Germain)
6. Nuno Mendes (Portugal/Paris Saint-Germain)
7. William Saliba (Prancis/Arsenal)
8. Dayot Upamecano (Prancis/Bayern Muenchen)

TENGAH
1. Jude Bellingham (Inggris/Real Madrid)
2. Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United)
3. Enzo Fernandez (Argentina/Chelsea dan Manchester City)
4. Pedri (Spanyol/Barcelona)
5. Declan Rice (Inggris/Arsenal)
6. Rodri (Spanyol/Manchester City dan Barcelona)
7. Vitinha (Portugal/Paris Saint-Germain)

DEPAN
1. Erling Haaland (Norwegia/Manchester City)
2. Harry Kane (Inggris/Bayern Muenchen)
3. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/Paris Saint-Germain)
4. Kylian Mbappe (Prancis/Real Madrid)
5. Lionel Messi (Argentina/Inter Miami)
6. Michael Olise (Prancis/Bayern Muenchen)
7. Cristiano Ronaldo (Portugal/Al Nassr)
8. Lamine Yamal (Spanyol/Barcelona)

AFC Resmi Tunda Piala Asia 2027

Digelar Akhir Desember

JAKARTA (Poskota) - Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) resmi menunda penyelenggaraan Piala Asia 2027 yang semula dijadwalkan berlangsung pada awal tahun depan. Keputusan tersebut diambil menyusul situasi keamanan di Arab Saudi dan kawasan Timur Tengah yang belum kondusif.

Penundaan dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan seluruh pihak yang terlibat dalam turnamen, mulai dari pemain, ofisial tim, penonton hingga pemangku kepentingan lainnya. AFC menilai kondisi keamanan dan hambatan transportasi berisiko mengganggu kelancaran kompetisi apabila tetap digelar sesuai jadwal awal.

Dalam pernyataan resminya, Selasa (3/11), AFC menyebutkan adanya situasi luar biasa yang membuat pelaksanaan turnamen tidak memungkinkan dilakukan sesuai rencana semula.

"Situasi luar biasa telah muncul terkait penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi sesuai jadwal semula, sehingga penundaan menjadi langkah yang perlu diambil demi kepentingan seluruh tim peserta, ofisial, penonton, dan pemangku kepentingan lainnya," demikian pernyataan AFC.

Selain persoalan keamanan, situasi di kawasan Timur Tengah juga berdampak terhadap kelancaran logistik dan penerbangan internasional. Kondisi tersebut dikhawatirkan menyulitkan mobilitas tim peserta, perangkat pertandingan, awak media, maupun suporter dari berbagai negara.

Ketegangan keamanan dilaporkan meningkat setelah serangkaian serangan rudal dan pesawat nirawak (drone) yang dikaitkan dengan kelompok Houthi Yaman menyasar sejumlah wilayah strategis Arab Saudi.

Salah satu insiden yang menjadi perhatian adalah serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang dilaporkan menimbulkan korban jiwa dan luka-luka.

Bandara tersebut merupakan salah satu pintu masuk utama bagi tim nasional, ofisial, media, dan suporter yang akan datang ke Arab Saudi untuk menyaksikan Piala Asia 2027. Gangguan terhadap fasilitas transportasi vital itu dinilai dapat menimbulkan risiko besar terhadap penyelenggaraan turnamen.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, AFC akhirnya menyetujui perubahan jadwal kompetisi sepak bola paling bergengsi di kawasan Asia itu.

Piala Asia 2027 kini dijadwalkan berlangsung pada 23 Desember 2027 hingga 21 Januari 2028. Perubahan ini membuat turnamen yang semula direncanakan digelar pada awal 2027 bergeser ke penghujung tahun dan berlanjut hingga awal 2028.

Keputusan tersebut diharapkan memberikan waktu lebih bagi penyelenggara untuk memastikan situasi keamanan, kelancaran transportasi, serta kesiapan seluruh aspek pendukung sebelum turnamen dimulai. **(ruh)**

Megawati Catat Rekor Ciamik di Matchday 1 Liga Voli Korea

SEOUL (Poskota) - Megawati Hangestri Pertiwi bersiap menjalani debut bersama Hyundai Hillstate pada pertandingan perdana Liga Voli Korea 2026/2027. Menariknya, lawan yang akan dihadapi pemain berjuluk Megatron tersebut adalah IBK Altos di Gimnasium Hwaseong, Selasa (3/11).

Pertandingan ini menjadi tantangan sekaligus kesempatan bagi Megawati untuk kembali menunjukkan ketajamannya. Apalagi, pevoli andalan Timnas Indonesia itu memiliki catatan impresif setiap kali menjalani pertandingan pertama Liga Voli Korea.

Rekam jejak Megawati pada dua musim sebelumnya bersama Red Sparks menjadi modal berharga. Ia selalu mampu tampil produktif dan memberikan kontribusi besar bagi timnya pada laga pembuka kompetisi.

Pada musim debutnya, 2023/2024, Megawati langsung mencuri perhatian ketika Red Sparks menghadapi IBK Altos. Dalam pertandingan tersebut, opposite hitter asal Indonesia itu menyumbangkan 21 poin dengan efektivitas serangan mencapai 47,37 persen.

Penampilan gemilang tersebut mengantarkan Megawati meraih penghargaan pemain terbaik atau Most Valuable Player (MVP) pertandingan.

Menariknya, IBK Altos kembali menjadi lawan Megawati pada pertandingan pembuka musim ini. Situasi tersebut membuka peluang bagi Megatron untuk mengulang keberhasilan yang pernah diraihnya ketika pertama kali berkarier di kompetisi voli Korea Selatan.

Catatan positif juga ditorehkan Megawati pada musim keduanya, 2024/2025. Menghadapi GS Caltex pada pertandingan pertama, ia kembali tampil tajam dengan mengoleksi 16 poin dan efektivitas serangan mencapai 80 persen.

Dikutip dari Naver, Megawati mencatatkan 12 serangan sukses dari total 15 percobaan ketika menghadapi GS Caltex. Statistik tersebut menunjukkan betapa efektifnya serangan Megawati dalam membantu Red Sparks meraih hasil positif.

Kini, bersama Hyundai Hillstate, Megawati berpeluang melanjutkan tradisi positif tersebut. Apalagi, performanya dalam turnamen pramusim KOVO Cup 2026 memperlihatkan perkembangan yang cukup menjanjikan.

Pada pertandingan pertama KOVO Cup 2026 yang sekaligus menjadi debutnya bersama Hillstate, Megawati menyumbangkan 14 poin ketika menghadapi Hi Pass. Efektivitas serangannya tercatat sebesar 35 persen.

Penampilannya kemudian meningkat pada pertandingan kedua melawan GS Caltex. Megawati berhasil mengumpulkan 15 poin dengan efektivitas serangan mencapai 50 persen.

Peningkatan tersebut menjadi sinyal positif menjelang bergulirnya kompetisi reguler. Megawati diharapkan mampu menjadi salah satu tumpuan serangan Hillstate sekaligus membantu tim barunya mengawali musim dengan kemenangan.

Laga melawan IBK Altos pun menjadi panggung pembuktian bagi Megatron. Bukan hanya untuk memperlihatkan kualitasnya bersama klub baru, tetapi juga mempertahankan reputasinya sebagai salah satu pemain asing yang patut diperhitungkan di Liga Voli Korea. **(ruh)**



Berita dari halaman 1

PT KAI Siapkan Alat Berat Bersihkan Kampung Bahari

"Pelaksanaannya tentu memperhatikan keselamatan perjalanan kereta api serta kondisi masyarakat di sekitar kawasan," kata Januri saat meninjau Kampung Bahari, Selasa (3/11).

Menurut dia, pembenahan kawasan tidak cukup hanya dengan membersihkan lingkungan. PT KAI bersama pemerintah juga membahas solusi jangka panjang, termasuk kemungkinan penyediaan hunian alternatif bagi warga yang terdampak penataan.

Januri menegaskan, pendekatan humanis melalui komunikasi dan dialog dengan masyarakat perlu dikedepankan. Dengan demikian, proses penataan dapat berjalan tanpa mengabaikan kondisi sosial dan ekonomi warga.

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto mengatakan, penataan Kampung Bahari harus disertai upaya memastikan masyarakat tidak kehilangan sumber penghidupan. Pendataan warga menjadi langkah awal untuk mengetahui kondisi tempat tinggal dan pekerjaan mereka.

"Penataan ini bukan untuk membuat warga negara kita yang selama ini mendapat penghasilan kemudian tidak ada penghasilan dan bingung. Negara hadir untuk memfasilitasi itu," ujar Dadang.

Dia menjelaskan, area yang sudah tidak ditempati akan menjadi prioritas pembersihan. Sementara bangunan yang masih dihuni perlu didata terlebih dahulu agar penanganannya dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Dadang juga menekankan pentingnya pengawasan kawasan untuk mencegah kembali munculnya peredaran narkoba. Menurut dia, upaya tersebut harus dibarengi pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan melibatkan kepolisian, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait.

Salah satu perhatian pemerintah adalah warga yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas pemilahan dan pengelolaan sampah. Untuk itu, peluang dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) turut dibahas agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati menyebutkan, sebanyak 46 warga Kampung Bahari telah tercatat sebagai penerima bantuan perbaikan rumah. Penerima bantuan tersebut tersebar di beberapa RW.

"Untuk Kampung Bahari, saat ini sudah ada 46 penerima bantuan perbaikan rumah yang tersebar di beberapa RW. Kami akan melakukan pendataan kembali untuk melihat kemungkinan penambahan penerima sesuai dengan ketersediaan program," kata Sri.

Menurut Sri, pemerintah juga tengah membahas alternatif tempat tinggal bagi warga yang nantinya terdampak penataan bersama PT KAI dan pemerintah daerah. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penyediaan hunian di kawasan Senen, Jakarta Pusat.

"Untuk alternatif hunian, kami masih melakukan pembahasan bersama PT KAI dan pemerintah daerah. Salah satu yang menjadi opsi adalah hunian di kawasan Senen, tetapi tentu perlu dikaji dan dibicarakan lebih lanjut," jelasnya.

Sri menambahkan, penataan Kampung Bahari harus memperhatikan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat. Pemerintah ingin memastikan pembenahan lingkungan tidak justru menimbulkan persoalan sosial baru bagi warga yang selama ini bekerja di sektor pemilahan dan pengelolaan sampah.

Melalui koordinasi lintas instansi tersebut, penataan Kampung Bahari diharapkan tidak hanya membuat lingkungan lebih bersih dan tertata, tetapi juga menciptakan kawasan yang lebih aman serta memberikan kepastian bagi masyarakat yang tinggal dan mencari nafkah di dalamnya. **(man)**

Berita dari halaman 1

Menjemput Asa di Tengah Dahaga Warga

"Alhamdulillah, senang sekali ada bantuan ini. Sumursumur di rumah sudah kering sejak dua bulan lalu, jadi air bersih ini sangat berarti untuk masak dan minum," ucap Siti (42), salah seorang warga, sembari mendekap erat jerigen yang baru saja ia isi penuh.

Aksi kemanusiaan ini merupakan bagian dari program Percepatan Anggota Kepolisian (PECAK). Tak hanya di Kampung Maja Asem, guyuran air bersih sebanyak total 16.000 liter ini juga disebar secara merata ke wilayah tetangga, yakni Kampung Cibungur, Desa Ciagel, Kecamatan Ciagel. Masing-masing kampung menerima jatah 8.000 liter air bersih yang langsung disambut antusias oleh ratusan warga.

Kapolres Serang AKBP Moehamad Probandono Bobby Danuardi, melalui Kapolsek Cikande Kompol Rudika Harto Kanajiri, menjelaskan bahwa aksi sosial ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri dalam meresponsi jeritan masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan paling dasar akibat musim kemarau.

"Kegiatan ini kami laksanakan guna membantu memenuhi kebutuhan pokok air bersih bagi masyarakat yang terdampak musim kemarau. Kami berharap bantuan dari Kapolres Serang ini dapat sedikit meringankan beban warga di Kampung Maja Asem dan Kampung Cibungur," ujar Rudika di selasela pemantauan distribusi air.

Bagi warga pedesaan di wilayah tersebut, ketersediaan air bersih bukan sekadar komoditas, melainkan urat nadi kehidupan sehari-hari. Rudika menegaskan, jajarannya tidak akan berhenti pada aksi simbolis semata. Pihaknya berkomitmen untuk terus memonitor wilayah-wilayah hukum Polsek Cikande yang rentan dilanda krisis air bersih.

"Polsek Cikande akan terus memantau kondisi wilayah yang berpotensi mengalami kesulitan air bersih. Kami berharap kegiatan ini dapat membantu masyarakat dan kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya," tutup Rudika optimistis.

Sore itu, di bawah langit Serang yang berdebu kemarau, deretan jerigen berisi air bersih yang dijinjing warga pulang membawa senyum dan harapan baru: bahwa di tengah keringnya bumi, uluran tangan sesama masih terus mengalir.■

Berita dari halaman 1

Ribuan Data Penerima KJMU Bermasalah

Usai menghadiri The 46th CityNet Executive Committee Meeting, Pramono menjelaskan, salah satu persoalan ditemukan pada sekitar 1.100 rekening penerima yang masih menggunakan nomor 10 digit. Padahal, format nomor rekening yang berlaku saat ini terdiri dari 11 digit.

Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian data NIK dengan identitas penerima, mulai dari jenis kelamin, usia, hingga tanggal lahir. Pembaruan data desil serta perbedaan informasi wilayah administrasi, seperti RT, RW, kelurahan dan kecamatan, juga ikut menghambat proses pencairan.

Pemprov DKI Jakarta turut mencatat adanya 14.554 penerima baru yang belum memiliki rekening Kartu Jakarta Pintar (KJP) serta 6.587 penerima baru KJMU. Di samping itu, terdapat 2.155 penerima baru yang menggunakan NIK di luar wilayah Jakarta.

Meski demikian, Pramono memastikan Pemprov DKI terus melakukan pembenahan data agar bantuan pendidikan tersebut segera diterima para mahasiswa yang berhak.

Ia menargetkan pencairan bagi mahasiswa yang melakukan perpanjangan bantuan dapat diselesaikan pada Selasa (3/11). Sementara itu, pencairan bagi penerima lainnya ditargetkan rampung paling lambat 6 November 2026.

"Saya sudah memerintahkan untuk yang perpanjangan, hari ini harus selesai. Untuk yang lainnya, maksimum tanggal 6 harus selesai," tegasnya.

Pramono berharap seluruh proses administrasi dan pencairan dapat segera dituntaskan sehingga mahasiswa tidak lagi terkendala dalam memenuhi kebutuhan pendidikan mereka.

Sebelumnya, pencairan bantuan KJMU Tahap II Tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada 30 Oktober 2026. Namun, hingga tiga hari setelah jadwal tersebut, sebagian penerima masih harus menunggu dana bantuan masuk ke rekening masing-masing. **(M3)**

Berita dari halaman 1

Driver Taksi Online Dibegal Tiga Penumpang

"Dalam kondisi terancam, korban diminta untuk tetap mengendarai mobil. Di tengah jalan, korban diikat dan ditutup matanya oleh dua terduga pelaku," ujar Muhdiawan, Selasa (3/11).

Setelah berhasil menguasai kendaraan, para pelaku kemudian menurunkan korban di sebuah lapangan di Kampung Bugel, Kelurahan Kadu Agung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.

Korban yang telah ditinggalkan para pelaku akhirnya berupaya menyelamatkan diri sebelum melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Tigaraksa, Polresta Tangerang.

"Para terduga pelaku berhasil membawa mobil, handphone dan dompet milik korban," ungkap Muhdiawan.

Ia menambahkan, polisi telah menerima laporan korban dan melakukan penanganan awal. Petugas juga masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas serta memburu para pelaku. "Saat ini masih dalam penyelidikan," pungkasnya. **(ver)**

Berita dari halaman 1

Karier Eks Kapolri Listyo Sigit Berakhir di Jeruji Besi

Sasaran penyadapan diduga berasal dari berbagai kalangan, mulai dari Presiden, pejabat negara, tokoh politik, wartawan, tokoh organisasi kemasyarakatan, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha. Kasus ini semakin menguat setelah penyidik menemukan dugaan perintah penghapusan berkas hasil penyadapan yang tersimpan dalam komputer sistem LINS sekitar Oktober 2026. Perintah tersebut diduga berasal dari salah satu tersangka.

Seorang petugas yang mengetahui aktivitas penghapusan dokumen itu kemudian melaporkannya kepada kepolisian. Laporan resmi terkait dugaan pelanggaran tersebut dibuat pada 30 Oktober 2026 dan menjadi salah satu pintu masuk pengungkapan perkara.

"Selanjutnya, pada sekitar Oktober 2026, tersangka memerintahkan untuk penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem LINS tersebut. Selanjutnya, pelapor selaku petugas yang mengetahui hal tersebut membuat laporan polisi pada tanggal 30 Oktober 2026," jelas Asep.

Dalam proses penyidikan, Bareskrim turut mengamankan sejumlah barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyadapan ilegal tersebut. Barang bukti itu terdiri dari 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, serta empat buah flashdisk yang diduga digunakan untuk menyimpan dokumen hasil intersepsi.

Sementara itu, penyidik masih mendalami keterangan Irjen Slamet Uliandi (SU) yang hingga kini berstatus sebagai saksi. Pemeriksaan terhadap Slamet dilakukan untuk mengungkap lebih jauh peran pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas penyadapan tersebut.

Asep mengatakan, pengungkapan perkara tidak bisa dilakukan sekaligus karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk mendalami berbagai temuan dan alat bukti. "Nggak mungkin kami dalam kurun waktu 24 jam harus menjelaskan atau membongkar itu semuanya, ya. Nanti ada tahapannya," terang Asep.

Atas dugaan perbuatannya, ketiga tersangka dijerat sejumlah pasal dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Penyidik menerapkan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Selain itu, mereka juga dijerat Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun penjara. Ketiganya turut disangkakan melanggar Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE terkait dugaan tindakan tanpa hak mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain. Ketentuan tersebut memiliki ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara.

Penyadapan Diketahui Prabowo

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumhamimipas) Yusril Ihza Mahendra, memastikan ketiga perwira tinggi tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan setelah penyidik Bareskrim Polri menemukan bukti permulaan yang cukup. Penahanan dilakukan setelah serangkaian pemeriksaan dan penyelidikan terhadap dugaan penyadapan tanpa hak.

"Telah dilakukan penahanan terhadap tiga orang perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia," ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/11).

Menurut Yusril, penyidik telah mengantongi bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status ketiga perwira tinggi tersebut menjadi tersangka. Selain itu, terdapat satu personel Polri lainnya yang turut diperiksa, tetapi masih berstatus sebagai saksi.

Ketiga tersangka masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. Dua tersangka lainnya merupakan jenderal polisi berpangkat inspektur jenderal (Irjen), yakni Ahri Sonta dan Eko Hadi.

Yusril menegaskan, proses penetapan tersangka hingga penahanan telah dilakukan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Hak-hak para tersangka juga tetap dijamin selama menjalani proses hukum. "Telah dilakukan satu serangkaian pemeriksaan disertai laporan kepada Bareskrim dan telah ditemukan bukti-bukti permulaan yang cukup," katanya.

Dalam perkara tersebut, para tersangka dijerat Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP Nasional serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ketentuan tersebut berkaitan dengan tindakan intersepsi atau penyadapan komunikasi elektronik tanpa hak.

Yusril menjelaskan, Pasal 258 KUHP mengatur larangan melakukan penyadapan terhadap komunikasi orang lain tanpa kewenangan yang sah. Ancaman pidana dalam pasal tersebut mencapai 10 tahun penjara. Sementara Pasal 332 KUHP mengatur ancaman pidana hingga enam tahun dan Pasal 32 ayat (1) UU ITE hingga delapan tahun penjara. "Pasal ini berkaitan dengan intersepsi atau pasal-pasal penyadapan. Yang intinya adalah pelanggaran terhadap Pasal 258, yaitu melakukan penyadapan tanpa hak terhadap orang lain," jelasnya.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, penyadapan diduga dilakukan sepanjang periode 2025 hingga 2026 dengan menggunakan perangkat komunikasi tertentu. Sejumlah nomor telepon milik tokoh penting diduga diintersep tanpa dasar kewenangan maupun kepentingan penegakan hukum yang sah.

Yusril juga membenarkan Presiden Prabowo Subianto telah mengetahui dirinya menjadi salah satu pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan. Informasi tersebut telah disampaikan Kapolri kepada Presiden. "Apakah Presiden tahu? Sudah barang tentu karena dilaporkan Kapolri kepada beliau," ungkap Yusril.

Meski demikian, pemerintah belum mengungkap secara terperinci modus penyadapan, materi komunikasi yang diperoleh, maupun tujuan tindakan tersebut. Yusril menyebut seluruh aspek itu masih menjadi bagian dari pendalaman penyidik Bareskrim Polri. Dia juga menegaskan, hingga saat ini penyidik belum menerapkan pasal-pasal terkait tindak pidana makar terhadap para tersangka, meskipun Presiden disebut menjadi salah satu target penyadapan.

Menurut Yusril, dugaan penyadapan tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai makar. Dalam KUHP, tindak pidana makar memiliki sejumlah kategori, antara lain makar terhadap presiden, pemerintah, serta upaya memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Kami ingin memastikan bahwa sampai sejauh ini pasal-pasal yang digunakan adalah pasal-pasal penyadapan dan intersepsi, baik di dalam KUHP maupun di dalam Undang-Undang ITE. Sama sekali tidak digunakan pasal-pasal yang terkait dengan makar," tegasnya.

Yusril meminta masyarakat menunggu perkembangan penyidikan karena perkara tersebut masih berada pada tahap awal. Penjelasan mengenai pihak-pihak yang menjadi sasaran, tujuan penyadapan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain akan disampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut.

Diusut Profesional dan Transparan

Adapun Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengingatkan proses pengekalan hukum terhadap sejumlah perwira tinggi Polri yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Dia meminta penanganan perkara tersebut dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Habiburokhman menegaskan, penetapan tersangka terhadap sejumlah perwira tinggi kepolisian merupakan bagian dari proses hukum yang harus dihormati. Karena itu, dia meminta semua pihak memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menangani perkara tersebut.

"Sebagai Ketua Komisi III DPR RI, saya menghormati sepenuhnya proses penegakan hukum yang tengah berlangsung terkait penetapan beberapa perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal," tegas Habiburokhman dalam keterangannya kepada awak media.

Politikus Partai Gerindra itu berharap, pengusutan kasus tersebut tidak dipengaruhi kepentingan pihak tertentu. Seluruh tahapan, mulai dari penyidikan hingga proses hukum selanjutnya, harus berjalan berdasarkan fakta dan ketentuan perundang-undangan.

Menurut dia, keterbukaan dalam penanganan perkara juga menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Dengan demikian, masyarakat dapat mengikuti perkembangan kasus tersebut tanpa muncul spekulasi akibat minimnya informasi.

"Kami di Komisi III berharap seluruh rangkaian proses hukum tersebut dapat berjalan secara profesional, objektif, dan transparan dari awal hingga akhir," harapnya.

Habiburokhman kembali menekankan pentingnya menghormati kewenangan aparat penegak hukum dalam menangani perkara tersebut. Dia berharap setiap tahapan berjalan sesuai prosedur sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengkhianatan Kedaulatan Informasi

Sedangkan, Analis politik dan kebijakan publik, Adib Miftahul menilai, penyadapan terhadap kepala negara merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan informasi sekaligus kehormatan simbol negara. Karena itu, perkara tersebut harus diusut secara serius dan menyeluruh tanpa tebang pilih.

Menurut Adib, tindakan penyadapan yang dilakukan di luar ketentuan hukum, terlebih menyasar Presiden Republik Indonesia, tidak bisa diperlakukan sebagai kejahatan biasa. Ada persoalan serius menyangkut keamanan dan kewibawaan institusi kepresidenan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. "Penyadapan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum, apalagi ini kepada Presiden Republik Indonesia, simbol negara. Bukan sekadar pidana biasa menurut saya. Ini sebuah pengkhianatan terhadap kedaulatan informasi, kedaulatan lambang negara yaitu Presiden," ujar Adib kepada Pos Kota.

Dia mendesak Polri membuka secara transparan seluruh rangkaian perkara tersebut, termasuk mengungkap siapa yang memerintahkan penyadapan, bagaimana mekanismenya, serta pihak-pihak yang terlibat.

Adib menegaskan, keterbukaan penyidikan penting untuk menghindari munculnya persepsi bahwa penanganan kasus tersebut hanya menjadi instrumen pertarungan politik antarkelompok elite. "Dengan begitu, ketika dibuka secara gamblang, ini murni penegakan hukum, bukan sandera-sanderaan politik," tegasnya.

Di sisi lain, Adib melihat perkara penyadapan tersebut berpotensi memperlebar keretakan hubungan politik antara Prabowo dan Jokowi. Terlebih, munculnya dugaan keterlibatan sejumlah pihak yang memiliki kedekatan politik dengan pemerintahan sebelumnya dapat memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang berada di balik operasi penyadapan tersebut. Menurut dia, penetapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka berpotensi memperkeruh situasi. Adib menilai Listyo selama ini memiliki kedekatan atau afiliasi politik dengan Jokowi. Kondisi itu memungkinkan munculnya reaksi dari pihak-pihak yang selama ini berada dalam lingkaran politik mantan presiden tersebut.

"Eskalasi politik saya kira akan terjadi. Bagaimanapun tidak bisa dipungkiri Listyo Sigit itu adalah orangnya atau berafiliasi secara politik kepada Jokowi. Orang-orang yang berafiliasi politik kepada Jokowi, saya kira tidak akan tinggal diam," ungkapnya.

Adib memperkirakan, pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan Jokowi bisa membingkai perkara tersebut sebagai serangan politik. Jika hal itu terjadi, persoalan hukum berpotensi berkembang menjadi konflik politik yang lebih luas.

Situasi tersebut juga beririsan dengan polemik mengenai posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang hingga kini masih menjadi perbincangan publik. Adib menilai, berbagai persoalan tersebut dapat memengaruhi kalkulasi politik Prabowo dalam menentukan arah hubungannya dengan Jokowi. "Drama politik ini akan terus terjadi, apalagi isu Gibran ini kan juga sedang terjadi terus-menerus. Tetapi ketika keputusan politik Prabowo ke depan akan seperti apa, setidaknya dia sudah punya alasan-alasan kuat," katanya.

Meski demikian, Adib menilai hubungan politik kedua tokoh tersebut masih memiliki peluang untuk diselesaikan. Namun, arah hubungan Prabowo dan Jokowi sangat bergantung pada perkembangan penyidikan serta sikap politik masing-masing. Dia menyebut pernyataan Prabowo dan Jokowi menjadi hal yang paling dinantikan untuk membaca perkembangan hubungan keduanya. Sebab, komunikasi langsung kedua tokoh tersebut dinilai dapat menentukan apakah persoalan ini akan semakin melebar atau justru mereda.

"Tetapi yang paling menarik ditunggu adalah bagaimana statement Prabowo dan bagaimana statement Jokowi. Hanya berdua itulah yang bisa menyelesaikan soal hubungan politik keduanya," tutur Adib.

Lebih jauh, Adib juga menyoroti sikap sejumlah partai politik yang sebelumnya memiliki kedekatan dengan Jokowi. Dia mempertanyakan belum terlihatnya pembelaan terbuka dari partai-partai tersebut ketika polemik mengenai Gibran mencuat. Menurutnya, sikap diam sejumlah partai politik itu bisa menjadi petunjuk adanya dinamika dan pertarungan kepentingan di tingkat elite yang berlangsung tanpa terlihat di ruang publik.

Adib menduga, partai-partai tersebut tengah menghitung posisi politik masing-masing demi menjaga kepentingan dan konfigurasi kekuatan menjelang Pemilu 2029. Namun, dia menegaskan dugaan tersebut masih perlu dicermati seiring perkembangan politik nasional.

"Apakah memang pertarungan politik secara senyap antara Jokowi dan Prabowo itu sedang terjadi? Ini bisa juga. Diannya partai politik dulu yang banyak diakomodir oleh Jokowi ketika berkuasa, apakah itu sinyal bahwa mereka tahu ini pertarungan tingkat tinggi yang berlangsung secara senyap?" ujarnya.

Kendati demikian, Adib mengingatkan agar dinamika politik tidak mengaburkan substansi perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut. Menurutnya, Polri harus memastikan pengusutan berjalan berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan kepentingan politik tertentu.

Dia menilai, pengungkapan kasus segera terbuka menjadi ujian bagi kepolisian untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

"Yang terpenting menurut saya adalah Polri menjelaskan secara utuh bahwa ini bukan sanderaan politik, bahwa ini adalah murni penegakan hukum, itu yang juga ditunggu oleh masyarakat," pungkasnya. **(man)**

POSKOTA
Media Independen

Diterbitkan oleh :
PT Media Antarkota Jaya
sejak 15 April 1970 di Jakarta

Pendiri : H. Harmoko (Almarhum)
H. Tahar (Almarhum), Yachya Suryawinata (Almarhum)

Direktur Utama/Pemimpin Umum : H. Azisoko
Direktur Operasional : Aby Iskandar
General Manager: Achmad Jani
Pemimpin Redaksi: H. Joko Lestari
Wakil Pemimpin Redaksi: Guruh Nara Persada

Pemasaran: Melinda Ratni (Manager)
- Astried Kharisma
- Herri Effendi

Kontak Redaksi :
021 – 22129129

Kontak Iklan :
0811-8872-888

Koordinator Liputan: Deny Zainuddin
Redaktur : Fernando Toga Mandalo, Winoto Anung, Febrian Hafizh Muchtamar,
Wartawan : Angga Pahlevi, Rahmat Haryono, Veronica Prasetio, Samsul Fatoni, Dadan Sukmana, Ramot Sormin, Ali Mansur
Desain Grafis : Widi Pramudio, Hiryanto, Bambang Wahyudi.
IT : Agus Hikmat Nugraha, Muhammad Fauzan.
Alamat Redaksi : Jl. Bang Pitung no. 22/5 Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. E-mail: redaksi@poskota.co.id

www.poskota.co.id

Panja Batal Rapat RUU Pemilu di Masa Reses

❍ PKS Optimistis Sebelum Akhir Tahun

JAKARTA (Poskota) - Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu di DPR RI kembali tertunda. Komisi II DPR batal menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu pada masa reses anggota dewan pekan ini. Meski demikian, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) optimistis pembahasan regulasi yang menjadi landasan Pemilu 2029 tersebut dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan setelah masa sidang kembali dibuka.

Ketua Panja RUU Pemilu, Bahtra Banong, mengatakan rapat pembahasan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menunggu penyesuaian jadwal. Rapat perdana yang semula direncanakan berlangsung pekan ini akhirnya diundur hingga setelah pembukaan masa sidang. "Rapat masih menyesuaikan waktu. Kemungkinan minggu depan setelah masa reses selesai," ujar Bahtra, kemarin.

Dengan penundaan tersebut, Panja akan menyusun ulang agenda pembahasan, termasuk jadwal rapat dan audiensi untuk menyerap masukan dari berbagai pihak. Pembahasan RUU Pemilu diperkirakan mulai berjalan setelah paripurna pembukaan masa sidang pada 9 November mendatang. "Kita sesuaikan masa sidang nanti ya," kata Bahtra yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra.



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong saat ditetapkan sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat, Dede Yusuf, sempat menyampaikan rencana menggelar rapat Panja meski anggota DPR masih menjalani masa reses. Salah satu materi yang akan menjadi perhatian adalah evaluasi terhadap polemik dugaan pasal selundupan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 yang dikaitkan dengan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

"Mungkin minggu depan kita akan coba rapat di masa reses. Sebagai Panja, jadi masukan itu (pembahasan evaluasi 'Pasal Gibran') kita masukkan ke agenda Panja. Enggak spesifik khusus soal PKPU-nya. Tapi soal RUU-nya," ujar Dede.

Namun, rencana tersebut akhirnya tidak terlaksana karena anggota DPR masih menjalankan agenda reses di daerah pemilihan masing-masing.

Anggota Panja RUU Pemilu dari Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, menilai pemundaan itu bukan menjadi hambatan berarti. Dia justru optimistis pembahasan RUU Pemilu dapat dirampungkan dalam waktu sekitar satu bulan pada masa sidang mendatang.

"Masa sidang yang akan datang ini kan mulai tanggal 9 (November) ya kan? Satu bulan lah kurang lebih. Insyaallah selesai. Saya optimistis itu bisa selesai," kata Jazuli di kompleks parlemen.

Menurut dia, masa reses merupakan kesempatan bagi anggota DPR untuk turun langsung menemui konstituen sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Karena itu, pembahasan legislasi tidak bisa dipaksakan ketika anggota dewan tengah menjalankan kewajiban tersebut.

"Di satu sisi kita juga harus menyelesaikan undang-undang pemilu, di sisi lain kita juga harus mendengar aspirasi dari masyarakat," ujarnya.

Optimisme PKS tersebut berbeda dengan perkiraan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin. Sebelumnya, Khozin memprediksi pembahasan RUU Pemilu membutuhkan waktu sekitar tiga bulan dan dapat diruntaskan paling lambat Maret 2027.

"Ya kalau ini pembahasan tiga bulan berarti Januari, Februari, Maret lah, tiga bulan berikutnya, maksimum ya itu," kata Khozin, Selasa (29/9).

Di sisi lain, pembahasan RUU Pemilu menghadapi tantangan karena regulasi tersebut belum masuk daftar prioritas legislasi DPR pada Masa Persidangan II hingga akhir Desember 2026.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyebut terdapat empat rancangan undang-undang yang menjadi prioritas untuk dibahas setelah masa reses, yakni RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, RUU Masyarakat Adat, RUU Administrasi Kependudukan, serta RUU Perampasan Aset.

"Pada Masa Persidangan II yang akan datang, terdapat empat agenda penting yang perlu kita kerjakan secara cermat dan saling terhubung," ujar Dasco dalam keterangannya, Rabu (28/10).

Padahal, pembahasan RUU Pemilu dinilai mendesak seiring persiapan tahapan Pemilu 2029, termasuk proses seleksi anggota KPU dan Bawaslu serta tindak lanjut terhadap sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Komisi II DPR sendiri telah mengidentifikasi 10 isu krusial yang akan dibahas dalam revisi UU Pemilu. Isu tersebut antara lain ambang batas parlemen (parliamentary threshold), ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), keterwakilan perempuan, penggunaan kecerdasan artifisial (AI), hingga mekanisme penyelesaian sengketa pemilu.

Dengan banyaknya persoalan mendasar yang harus diselesaikan, pembahasan RUU Pemilu menjadi pekerjaan penting DPR agar regulasi penyelenggaraan pesta demokrasi 2029 memiliki kepastian hukum dan tidak berbenturan dengan putusan MK. **(ruh)**

Gerindra Pecat Tiga Kader Anggota DPRD Pesta Narkoba di Surabaya

JAKARTA (Poskota) - Partai Gerindra akhirnya menjatuhkan sanksi tegas terhadap tiga kadernya yang terlibat pesta narkoba di sebuah hotel kawasan Ketintang, Surabaya, Jawa Timur. Majelis Kehormatan Partai Gerindra memutuskan memecat ketiganya dari keanggotaan DPRD setelah melalui sidang internal pada 8 Oktober 2026.

Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, keputusan pemecatan tersebut telah ditetapkan melalui sidang Mahkamah Partai. Ketiganya dinilai melakukan pelanggaran berat yang tidak dapat ditoleransi oleh partai.

"Mahkamah Partai telah memutuskan mereka dipecat sebagai anggota DPRD Gerindra pada sidang yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2026 atau hampir sebulan lalu," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Selasa (3/11).

Tiga kader yang dijatuhi sanksi pemecatan tersebut masing-masing berinisial ARR, anggota DPRD Kabupaten Situbondo, ADR dari DPRD Banyuwangi, serta UAM dari DPRD Kabupaten Malang.

Kasus ini bermula ketika polisi menggerebek sebuah hotel di kawasan Ketintang, Surabaya, pada Senin (28/9) dini hari. Dalam penggerebekan tersebut, ketiga anggota DPRD itu diamankan bersama lima orang lainnya, yakni F, K, N, Ro, dan R.

Penggerebekan dilakukan setelah polisi menemukan dugaan aktivitas penyalahgunaan narkotika di lokasi tersebut. Dari tempat kejadian perkara, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa satu plastik bekas sabu, dua butir pil ekstasi berwarna kuning, alat isap, korek api, serta satu bungkus rokok yang digunakan untuk menyimpan sabu.

Polisi kemudian melakukan pemeriksaan urine terhadap delapan orang yang diamankan. Hasilnya, seluruhnya dinyatakan positif mengonsumsi ekstasi. Sementara itu, seorang berinisial N diketahui positif menggunakan dua jenis narkotika sekaligus.

Sebelum keputusan pemecatan ditetapkan, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Timur lebih dahulu merekomendasikan pemberian sanksi maksimal terhadap ketiga kader tersebut.

Sekretaris DPD Gerindra Jawa Timur Kharisma Febriansyah mengatakan, rekomendasi pemecatan diberikan setelah hasil pemeriksaan Polrestabes Surabaya membuktikan ketiganya menggunakan narkoba.

"Rekomendasi kami adalah pemecatan untuk tiga Anggota DPRD Fraksi Gerindra yang memakai narkoba," kata Kharisma, Senin (5/10).

Kharisma menegaskan, partai tidak akan memberikan toleransi kepada kader yang terlibat penyalahgunaan narkotika. Menurut dia, tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap aturan dan asas perjuangan partai.

"Rekomendasi pemecatan akan segera dikirim. Penyalahgunaan narkoba jenis apa pun, itu merupakan pelanggaran berat di partai," tegasnya.

Meski telah dinyatakan positif menggunakan narkotika, proses hukum terhadap delapan orang tersebut tidak berlanjut dengan penahanan. Mereka menjalani penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice.

Langkah tersebut diambil karena jumlah barang bukti yang ditemukan berada di bawah ambang batas sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

Saat ini, ketiga anggota DPRD dari Fraksi Gerindra tersebut menjalani rehabilitasi rawat jalan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Banyuwangi.

Keputusan pemecatan ini menjadi sikap tegas Gerindra terhadap kader yang tersandung kasus penyalahgunaan narkotika. Namun, proses rehabilitasi dan penanganan hukum terhadap ketiganya tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. **(ruh)**



Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra Habiburokhman.

Golkar Serahkan Nasib Nusron Wahid kepada KPK

JAKARTA (Poskota) - DPP Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) atas tanah yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor, yang turut menyeret nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

Partai Golkar meminta lembaga antirasuah tersebut menjalankan kewenangannya secara profesional dalam mengusut perkara yang terjadi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Golkar juga meyakini KPK memiliki mekanisme dan langkah hukum tersendiri untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya tidak akan mencampuri proses hukum yang sedang berjalan. Penanganan perkara sepenuhnya menjadi kewenangan KPK sebagai lembaga penegak hukum.

"Ya, saya kira tergantung KPK saja. Sudah kita serahkanlah sepenuhnya kepada KPK," kata Doli kepada wartawan di Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Jakarta, Senin (2/11).

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar itu menegaskan, KPK telah mendapat mandat undang-undang untuk memberantas korupsi. Karena itu, ia percaya penyidik akan mengambil langkah konstitusional sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan indikasi tindak pidana.

"Saya kira KPK sudah diberi amanah oleh undang-undang sebagai lembaga penegak hukum, salah satunya dalam pemberantasan korupsi. KPK-lah yang paling tahu langkah-langkah apa saja yang harus diambil, apalagi kalau ada indikasi-indikasi," ujarnya.

Doli kembali menegaskan, Golkar tidak akan mengintervensi proses penyidikan maupun menentukan langkah yang harus ditempuh lembaga antirasuah tersebut. "Kita serahkan sepenuhnya kepada KPK," tegasnya.

Sementara itu, KPK masih mengevaluasi langkah lanjutan untuk menghadirkan Nusron Wahid sebagai saksi dalam perkara dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, tim penyidik tengah membahas kemungkinan kembali memanggil Nusron setelah dua kali agenda pemeriksaan sebelumnya tidak terlaksana.

"Iya, ini sedang dievaluasi oleh tim terkait rencana pemanggilan yang bersangkutan. Nanti kalau tim sudah mengajukan surat panggilan akan di-update," kata Taufik kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, KPK telah dua kali menjadwalkan pemeriksaan Nusron sebagai saksi. Pada pemanggilan pertama, Nusron menyampaikan tidak dapat hadir karena memiliki agenda kedinasan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Pemeriksaan kemudian dijadwalkan ulang. Namun, Nusron kembali tidak memenuhi panggilan dengan alasan sedang menjalankan kegiatan di luar negeri.

Ketidakhadiran tersebut kini menjadi bahan evaluasi penyidik untuk menentukan langkah berikutnya, termasuk kemungkinan menerbitkan surat panggilan kembali.

Keterangan Nusron dinilai penting bagi penyidik untuk mengklarifikasi sejumlah temuan dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT). Pemeriksaan juga diperlukan untuk mendalami konstruksi perkara, termasuk dugaan alur perintah serta aliran uang di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

KPK masih mendalami keterkaitan berbagai temuan tersebut guna mengungkap secara utuh perkara dugaan korupsi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. **(ruh)**



Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia.

Demokrat Tahan Sikap Tunggu 14 Hari Sejak Putusan MA soal Gibran

JAKARTA (Poskota) - Partai Demokrat belum menentukan sikap politik terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah. Partai berlambang bintang mercy itu memilih menunggu hingga tenggat waktu 14 hari setelah putusan diterbitkan.

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Demokrat di DPR RI, Hinca Pandjaitan, mengatakan partainya masih mempelajari tahapan hukum yang harus dilalui sebelum mengambil sikap politik. Menurut dia, masa 14 hari tersebut perlu diperhatikan untuk memastikan apakah ada persoalan hukum lanjutan setelah putusan MA dibacakan.

"Ketika teman-teman tanya sikap politik, saya mau jelaskan dulu tahapan itu. Berarti 14 hari kerja harus kita tunggu, baru kemudian barangkali teman-teman akan menanyakan kepada partai-partai politik berkenaan dengan sikap politiknya," kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/11).

Hinca menjelaskan, apabila dalam kurun waktu tersebut tidak muncul persoalan hukum, putusan MA akan berlaku. Karena itu, Demokrat belum ingin terburu-buru menyampaikan pandangan politik sebelum memahami secara utuh substansi putusan tersebut.

Saat ini, Demokrat masih menunggu salinan resmi putusan MA untuk mempelajari pertimbangan hukum majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Salinan itu dinilai penting sebagai landasan partai dalam menentukan langkah selanjutnya.

"Supaya kita tahu pertimbangan hukum apa yang dijatuhkan atau yang diberikan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara ini. Dari situlah barangkali nanti mengambil sikap atau putusan setelah kita membacanya," ujar Hinca.

Dia memperkirakan polemik putusan MA tersebut juga akan menjadi pembahasan di lingkungan DPR setelah anggota dewan kembali dari masa reses. Masa sidang mendatang dijadwalkan mulai sekitar 9 atau 10 November 2026.

"Saya kira semua anggota DPR nanti masuk tanggal 9-10 gitu ya, pasti akan membicarakan ini, karena semua sudah tahu, semua sudah mendengarkan. Tapi sikap politiknya barangkali baru akan ketahuan nanti di tanggal-tanggal itu," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, justru telah menyampaikan pandangan lebih tegas. Dia menilai Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden menyusul putusan MA yang membatalkan keabsahan suket penyetaraan ijazah SMA yang digunakan dalam pencalonan pada Pilpres 2024.

Menurut Jansen, amar putusan MA sudah jelas dan tegas sehingga tidak membutuhkan penafsiran lebih lanjut. Dia menilai keputusan tersebut memiliki konsekuensi terhadap legitimasi Gibran sebagai wakil presiden.

Jansen juga membandingkan putusan MA tersebut dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya. Menurut dia, putusan MK masih menyisakan ruang penafsiran, sedangkan amar putusan MA kali ini dinilai lebih jelas.

Atas dasar itu, Jansen menyebut terdapat dua pilihan yang dapat ditempuh, yakni Gibran mengundurkan diri atau DPR bersama MPR mengambil langkah politik melalui proses pemakzulan.

Sebelumnya, MA mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran. Dalam amar putusannya, MA menyatakan suket penyetaraan SMA atau sederajat yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 tidak sah.

Meski demikian, Partai Demokrat melalui Hinca menegaskan masih akan mencermati salinan putusan beserta pertimbangan hukumnya sebelum menentukan sikap resmi. Dengan demikian, arah sikap politik partai tersebut terhadap polemik status pendidikan Gibran masih menunggu hasil kajian internal dan perkembangan hukum selanjutnya. **(ruh)**